

**IMPLEMENTASI INDEKS DESA ZAKAT PADA
MASYARAKAT DESA TAMBARANA
KECAMATAN POSO PESISIR
UTARA KABUPATEN POSO**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Ekonomi (SE)
Jurusan Ekonomi Islam pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Oleh:

MARYAM

NIM: 90100115037

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR**

2019

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI


Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Maryam
Nim : 90100115037
Tempat/Tgl Lahir : Pendolo, 15 Desember 1997
Jurusan : Ekonomi Islam
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Alamat : Samata, Gowa
Judul : Implementasi Indeks Desa Zakat Pada Masyarakat Desa
Tambarana Kecamatan Poso Pesisir Utara Kabupaten Poso

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi ini dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Gowa, November 2019

Penyusun,



Maryam

90100115037



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Kampus I : Jl. Sultan Alauddin No. 63 Makassar ■ (0411) 864924, Fax. 864923
Kampus II : Jl. H.M. Yasin Limpo Romangpolong – Gowa . ■ 424835, Fax424836

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul **"Implementasi Indeks Desa Zakat Pada Masyarakat Desa Tambarana Kecamatan Poso Pesisir Utara"** yang disusun oleh **Maryam, NIM: 90100115037**, Mahasiswi Jurusan Ekonomi Islam pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang Munaqasyah yang diselenggarakan pada hari Kamis tanggal 14 November 2019, bertepatan dengan 17 Rabiul Awal 1441 H, dan dinyatakan telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Islam pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Jurusan Ekonomi Islam.

Samata-Gowa, Desember 2019

DEWAN PENGUJI

Ketua	: Dr. Muh. Wahyuddin Abdullah, S.E., M.Si., Ak.	(.....)
Sekretaris	: Dr. Amiruddin K, M.EI.	(.....)
Munaqisy I	: Prof. Dr. H. Abustani Ilyas, M.Ag.	(.....)
Munaqisy II	: Akramunnas, S.E., M.M.	(.....)
Pembimbing I	: Dr. Hj. Rahmawati Muin, S.Ag., M.Ag.	(.....)
Pembimbing II	: Dr. Murtiadi Awaluddin, M.Si.	(.....)

Diketahui Oleh :

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar



Prof. Dr. H. Abustani Ilyas, M.Ag.
19661130 199303 1 003

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا ، تَبَارَكَ الَّذِي جَعَلَ فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا وَقَمَرًا مُنِيرًا

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

Puji Syukur Atas Kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga penulis mengambil skripsi dengan judul **“Implementasi Indeks Desa Zakat Pada Masyarakat Desa Tambarana Kecamatan Poso Pesisir Utara Kabupaten Poso”** dapat terselesaikan. Shalawat dan salam tak lupa penulis kirimkan kepada junjungan nabi besar Muhammad SAW. Teladan terbaik sepanjang zaman, sosok pemimpin yang paling berpengaruh sepanjang sejarah kepemimpinan, sosok yang mampu menumbangkan zaman penindasan terhadap nilai-nilai humanitas, yang dengannya manusia mampu berhijrah dari satu masa yang tidak mengenal peradaban menuju satu masa yang berperadaban.

Didasari sepenuhnya, bahwa penulisan skripsi ini tidak terlepas dari yang namanya kekurangan atau ketidaksempurnaan, dalam menyelesaikan skripsi ini penulis banyak mengalami kesulitan maupun hambatan. Oleh karena itu penulis membutuhkan berbagai bantuan dari kalangan akademisi maupun non-akademisi, sehingga segala kesulitan dan hambatan tersebut penulis dapat menghadapinya dan skripsi ini dapat terselesaikan.

Proses pembuatan skripsi ini tentunya tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, maka dari itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak tercinta Abd. Rasyad dan Ibu saya tercinta Hasni yang telah mendoakan, menyayangi, mendidik, membesarkan, membiayai dan

memberikan saya motivasi untuk melangkah dan melupakan lelah demi berjuang di jalan Allah SWT. Kepada Keluarga saya adik saya yang selama ini memberikan saya motivasi demi mencapai cita-cita saya agar kelak saya bisa menjadi panutan yang baik dalam keluarga. Kepada tante, om serta keluarga lainnya saya mengucapkan banyak terima kasih atas bantuannya selama ini.

2. Bapak Prof. H. Hamdan Juhannis, M.A., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
3. Bapak Prof. Dr. H. Abustani Ilyas, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Negeri Alauddin Makassar yang telah memberikan izin penelitian.
4. Bapak Ahmad Efendi, M.M. selaku Ketua Jurusan Ekonomi Islam dan Bapak Akramunnas, M.M. selaku sekretaris jurusan yang telah memberikan kelancaran pelaksanaan penelitian dan izin untuk menyelesaikan skripsi ini.
5. Ibu Dr. Hj. Rahmawati Muin, S.Ag., M.Ag. selaku pembimbing I saya yang telah banyak membantu dalam proses bimbingan dan berbagi dalam ilmunya serta memberikan arahan dalam penyusunan skripsi ini.
6. Bapak Dr. Murtiadi Awaluddin, M.Si. selaku pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu, dan kesabarannya dalam proses bimbingan serta arahan dan kritik, saran dalam menyelesaikan skripsi ini.

7. Bapak dan Ibu Dosen, Staf, Pegawai Perpus Fakultas Ekonomi dan Bisnis islam yang telah memberikan ilmu dan nasehat selama di bangku perkuliahan.
8. Informan yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk di lakukan Tanya jawab sehingga wawancaranya berjalan dengan lancar.
9. Terima kasih kepada teman dan sahabat saya Eva Kurniawati, Nova Cahya Marzuki, Nur Adriana, Nur Inta, Anni Amelia Munir, Nurhaira, Ramalia dan Lismawati yang telah memberikan semangat dan motivasi serta rela menerima curhatan, memberikan inspirasi, mendukung saat saya nyaris untuk menyerah namun mereka tak menyerah untuk memberikan saya motivasi mengenai skripsi ini dan akhirnya bisa terselesaikan.
10. Terima kasih kepada teman dan juga sahabat saya dari kecil dan juga teman seperjuangan dari SMA yang selalu memberikan dukungan dan selalu mensupport saya dari jauh.
11. Teman sekelas penulis (Ekonomi Islam A angkatan 015) yang tidak dapat saya tuliskan satu persatu, terimakasih atas semua bantuan dan kebersamaannya selama ini.
12. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang telah membantu dalam kelancaran skripsi ini.

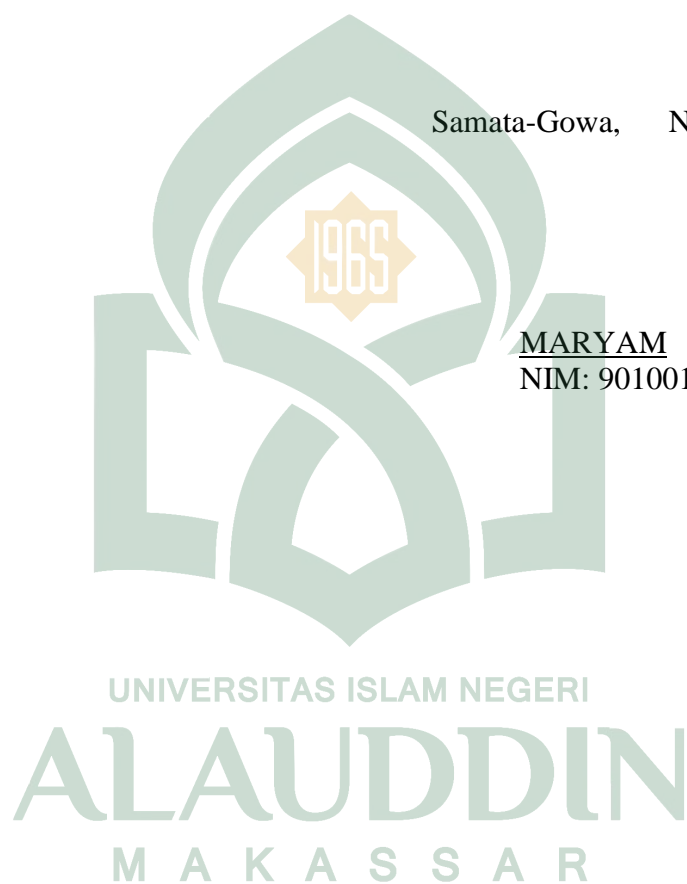
Penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati penulis menerima saran dan kritik dari para pembaca yang bersifat konstruktif dan berbagai pihak demi kesempurnaan skripsi

ini. Akhirnya penulis panjatkan doa agar seluruh pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, semoga segala bentuk bantuan dan amal baiknya kepada penulis mendapatkan imbalan dan pahala dari Allah Swt. Semoga skripsi ini memberikan manfaat bagi penulis sendiri maupun penulis berikutnya, dan juga pembaca.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Samata-Gowa, November 2019

MARYAM
NIM: 90100115037



DAFTAR ISI

JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
ABSTRAK	xii
BAB I PENDAHULUAN	1-10
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Definisi Operasional.....	6
D. Penelitian Terdahulu	7
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
BAB II TINJAUAN TEORITIS	11-25
A. Konsep Kemiskinan	11
B. Konsep Zakat	12
C. Pendayagunaan Zakat	19
D. Zakat Community Development (ZCD)	21
E. Indeks Desa Zakat (IDZ)	21
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	26-37
A. Jenis dan Lokasi Penelitian	26
B. Pendekatan Penelitian	26
C. Sumber Data Penelitian	27
D. Metode Pengumpulan Data	28
E. Instrumen Penelitian	28
F. Teknik Analisis Data	29

G. Komponen Indeks Desa Zakat (IDZ)	29
H. Tahapan Penghitungan Indeks Desa Zakat (IDZ)	32
I. Pembobotan Indeks Desa Zakat (IDZ)	34
BAB IV PEMBAHASAN	38-57
A. Gambaran Umum Desa Tambarana	38
B. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa	40
C. Nilai Indeks Dimensi Ekonomi Pada Masyarakat Desa Tambarana	42
D. Nilai Indeks Dimensi Kesehatan Pada Masyarakat Desa Tambarana	45
E. Nilai Indeks Dimensi Pendidikan Pada Masyarakat Desa Tambarana	48
F. Nilai Indeks Dimensi Sosial dan Kemanusiaan Pada Masyarakat Desa Tambarana	50
G. Nilai Indeks Dimensi Dakwah Pada Masyarakat Desa Tambarana	53
BAB V PENUTUP	58-59
A. Kesimpulan	58
B. Saran.....	59
DAFTAR PUSTAKA	60-61
LAMPIRAN	
RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Garis Kemiskinan, Penduduk Miskin, dan Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Poso Tahun 2010 – 2018	3
Tabel 2.1	Komponen Indeks Desa Zakat (IDZ)	24
Tabel 3.1	Komponen Indeks Desa Zakat (IDZ)	30
Tabel 3.2	Score Range Indeks Desa Zakat (IDZ)	33
Tabel 3.3	Pembobotan Komponen Indeks Desa Zakat (IDZ)	34
Tabel 4.1	Nilai Indeks Variabel Dimensi Ekonomi	42
Tabel 4.2	Nilai Indeks Variabel Dimensi Kesehatan	46
Tabel 4.3	Nilai Indeks Variabel Dimensi Pendidikan	48
Tabel 4.4	Nilai Indeks Variabel Dimensi Sosial dan Kemanusiaan	51
Tabel 4.5	Nilai Indeks Variabel Dimensi Dakwah	54



DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Bagan Struktur Pemerintahan Desa Tambarana Kecamatan Poso Pesisir Utara Kabupaten Poso	41
--	----



ABSTRAK

Nama : Maryam
Nim : 90100115037
Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Islam
Judul Skripsi : *Implementasi Indeks Desa Zakat Pada Masyarakat Desa Tambarana Kecamatan Poso Pesisir Utara Kabupaten Poso.*

Skripsi yang berjudul “Implementasi Indeks Desa Zakat Pada Masyarakat Desa Tambarana Kecamatan Poso Pesisir Utara Kabupaten Poso”. Skripsi ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan tentang layak atau tidak layaknya Desa Tambarana Kecamatan Poso Pesisir Utara Kabupaten Poso dalam menerima bantuan dana zakat oleh pihak BAZNAS.

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian kuantitatif yang dilaksanakan di Desa Tambarana Kecamatan Poso Pesisir Utara Kabupaten Poso. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui kuisioner, wawancara dan dokumentasi. Kemudian data tersebut dianalisis menggunakan metode kuantitatif deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari hasil pengukuran Indeks Desa Zakat (IDZ) pada Desa Tambarana Kecamatan Poso Pesisir Utara Kabupaten Poso diperoleh nilai IDZ sebesar 0,71. Dan jika dikategorikan kedalam *Score Range* maka Desa Tambarana termasuk kedalam kategori baik, yang artinya Desa Tambarana ini kurang diprioritaskan untuk dibantu oleh BAZNAS dengan dana zakat. Hanya saja jika dilihat dari dimensi ekonominya desa tersebut dapat dipertimbangkan untuk dibantu agar dapat lebih meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.

Kata Kunci: Implementasi, Indeks Desa Zakat (IDZ).

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Zakat adalah kewajiban yang ditetapkan oleh Allah kepada orang muslim untuk mengeluarkan sebagian hartanya yang kadarnya sudah memenuhi kriteria syariat agama Islam. Selain kadar dan syarat-syaratnya, jenis harta dan sumber harta juga termasuk dalam kriteria menunaikan zakat.¹ Adanya perbedaan kondisi ekonomi seringkali menjadi masalah bagi manusia dan menyebabkan timbulnya kesenjangan yang sulit di control seperti adanya orang kaya yang dititipi harta melimpah tetapi tidak dimanfaatkan untuk menolong orang miskin atau yang membutuhkan. Sehingga dengan adanya zakat ini bertujuan untuk mengatasi kesenjangan atau permasalahan tersebut.²

Zakat mempunyai dua fungsi utama yaitu pertama, zakat berfungsi sebagai ibadah yakni membersihkan harta benda dan jiwa manusia agar senantiasa berada dalam keadaan fitrah sebagai bentuk pelaksanaan ibadah kepada Allah. Kedua, zakat berfungsi sebagai dana masyarakat yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan sosial dalam mengurangi kemiskinan sebagai upaya mencapai keadilan sosial. Zakat yang dikeluarkan juga berfungsi sebagai ibadah baginya dan sekaligus juga berlaku sebagai dana sosial yang dapat dimanfaatkan untuk mengatasi berbagai masalah kemasyarakatan. Diantaranya yaitu masalah kemiskinan.³

¹Bahdar, "Kinerja Badan Amil Zakat Provinsi Sulawesi Tengah (Mengumpul Dan Mendistribusikan Zakat), *Jurnal Penelitian Ilmiah* Vol. 5, No. 2 (2017), h. 300.

²Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam: Sejarah, Konsep, Instrumen, Negara, dan Pasar*, Cet. 2 (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 66-67.

³Alfan Jamil, "Implementasi Indeks Desa Zakat Pada Desa Sungai Dua Kecamatan Rambutan", *Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Islam* Vol. 1, No. 2 (2018), h. 246.

Sebagaimana firman Allah Swt. QS. At-Taubah/9: 60.

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي
الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ^ط فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ^ق وَاللَّهُ عَلِيمٌ
حَكِيمٌ ﴾

Terjemahnya:

Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.⁴

Kemiskinan merupakan isu global bagi negara-negara berkembang. Kemiskinan sendiri dapat diartikan sebagai lemahnya kemampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan dasarnya, baik pangan, sandang, perumahan, pendidikan, maupun kesehatannya. Adapun jumlah penduduk miskin di Kabupaten Poso Provinsi Sulawesi Tengah dapat dilihat pada Tabel 1.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

⁴Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahnya*, (Surabaya: Halim, 2014), h. 196.

Tabel 1.1
Garis Kemiskinan, Penduduk Miskin, dan Persentase Penduduk Miskin di
Kabupaten Poso Tahun 2010 – 2018

Tahun	Jumlah Penduduk (000 Jiwa)	Garis Kemiskinan (Rp)	Penduduk Miskin (000 Jiwa)	Persentase Penduduk Di Bawah GK (Penduduk Miskin)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2010	210,19	262.942	45,3	21,42
2011	215,30	286.000	43,0	20,10
2012	220,30	312.764	40,8	18,46
2013	225,38	343.385	41,3	18,22
2014	230,52	368.562	39,65	17,09
2015	235,57	378.190	42,64	18,16
2016	240,81	416.003	42,23	17,71
2017	245,99	429.161	41,88	17,16
2018	251,18	449.834	41,74	16,71

Sumber: BPS Kabupaten Poso 2018

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa tren garis kemiskinan ternyata dari tahun ke tahun tampak dinamis bahkan cenderung meningkat. Dari tahun 2010 ke 2018 garis kemiskinan telah mengalami kenaikan sebanyak 71% atau 1,71 kali lebih besar (dari Rp 262.942 per kapita per bulan menjadi Rp 449.834 per kapita per bulan), peningkatan ini sejalan dengan tren perubahan harga atau inflasi yang menerangkan bahwa memang kebutuhan hidup manusia setiap saat berubah seiring perkembangan zaman. Saat ini, garis kemiskinan Kabupaten Poso adalah sebesar Rp 449.834 per kapita per bulan, mengartikan besarnya pengeluaran/konsumsi makanan dan non makanan per kapita per bulan penduduk miskin yang ada di Kabupaten Poso.⁵

Berikut merupakan pengeluaran/konsumsi penduduk dengan kelompok pengeluaran 40% terbawah di Kabupaten Poso. Dari total pengeluaran yang

⁵Badan Pusat Statistik, *Ringkasan Eksekutif Kemiskinan Kabupaten Poso 2018*, (Poso: Badan Pusat Statistik Kabupaten Poso, 2018), h. 3.

mereka keluarkan, 62,32% adalah pengeluaran makanan dan 37,68% bukan makanan. Artinya bahwa kebutuhan makanan masih menjadi prioritas utama (primer) dikalangan penduduk berpendapatan rendah. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar pengeluaran di kalangan ini digunakan untuk membeli makanan.

Beberapa jenis komoditi dengan rata-rata pengeluaran makanan tertinggi pada kelompok penduduk berpendapatan rendah di Kabupaten Poso adalah makanan dan minuman jadi, padi-padian, rokok dan tembakau. Artinya, untuk memperoleh Garis Kemiskinan Makanan (GKM) Kabupaten Poso, beberapa komoditas tersebut memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap pengeluaran konsumsi makanan.

Pola pengeluaran ini dapat digunakan sebagai salah satu alat untuk menilai tingkat kesejahteraan (ekonomi) penduduk, dimana semakin rendah persentase pengeluaran untuk makanan terhadap total pengeluaran maka semakin baik tingkat perekonomian penduduk. Sebaliknya semakin tinggi persentase pengeluaran untuk makanan terhadap total pengeluaran maka semakin buruk tingkat perekonomian penduduk tersebut.⁶

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sebagai lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional turut andil dalam mengatasi permasalahan kemiskinan serta kesenjangan yang terjadi di Indonesia, salah satunya dengan melakukan program *Zakat Community Development* (ZCD). Program ZCD dilakukan dengan memberdayakan masyarakat dengan menysasar komunitas mustahiq yang hidup di desa-desa yang tertinggal kesejahteraan maupun sarana dan prasarananya.

⁶Badan Pusat Statistik, *Ringkasan Eksekutif Kemiskinan Kabupaten Poso 2018*, h. 4.

Penentuan status kelayakan suatu desa untuk menerima zakat dalam pelaksanaan *Zakat Community Development* (ZCD) memiliki alat ukur khusus yang disebut Indeks Desa Zakat (IDZ). Indeks Desa Zakat merupakan sebuah alat mekanisme yang digunakan untuk mengukur kondisi sebuah desa sehingga dapat dikatakan layak atau tidak layak dibantu oleh BAZNAS dengan dana zakat. Oleh karena itu, Indeks Desa Zakat juga dapat digunakan sebagai alat monitoring dan evaluasi atas proses pengelolaan zakat di suatu desa.⁷

Tujuan dilakukannya Indeks Desa Zakat yaitu untuk mengukur sejauh mana perkembangan desa tersebut, dan diharapkan dapat memperoleh data yang tepat sehingga dapat digunakan untuk menentukan penyaluran program produktif yang tepat bagi komunitas mustahiq. Adapun manfaat dilakukannya Indeks Desa Zakat pada masyarakat desa yaitu sebagai suatu evaluasi atas proses pengelolaan zakat yang ada di desa tersebut, yang selanjutnya dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam penyaluran dana zakat.

Dengan adanya program *Zakat Community Development* yang dikeluarkan oleh BAZNAS diharapkan dapat mengurangi jumlah penduduk miskin yang ada, di Kabupaten Poso khususnya di Desa Tambarana. Dimana rata-rata penghasilan masyarakat di Desa Tambarana sendiri yang dikategorikan miskin itu adalah 1.000.000 sampai dengan 1.000.000 per bulannya. Sedangkan angka garis kemiskinan pada tahun 2018 menurut survei sosial ekonomi nasional adalah 449.834 per kapita per bulan.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti status Desa Tambarana dalam menerima bantuan dana zakat menggunakan metode Indeks Desa Zakat dan mengangkat masalah ini menjadi bahan tulisan

⁷PUSKAS BAZNAS, *Indeks Desa Zakat: Dari Desa Untuk Zakat Yang Terukur Dan Berkemajuan*, Cet. 1 (Jakarta: PUSKAS BAZNAS, 2017), h. viii.

dengan judul **“Implementasi Indeks Desa Zakat Pada Masyarakat Desa Tambarana Kecamatan Poso Pesisir Utara Kabupaten Poso”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas maka penulis merumuskan permasalahan dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Bagaimanakah implementasi Indeks Desa Zakat dimensi ekonomi pada masyarakat Desa Tambarana Kecamatan Poso pesisir Utara Kabupaten Poso?
2. Bagaimanakah implementasi Indeks Desa Zakat dimensi kesehatan pada masyarakat Desa Tambarana Kecamatan Poso pesisir Utara Kabupaten Poso?
3. Bagaimanakah implementasi Indeks Desa Zakat dimensi pendidikan pada masyarakat Desa Tambarana Kecamatan Poso pesisir Utara Kabupaten Poso?
4. Bagaimanakah implementasi Indeks Desa Zakat dimensi sosial dan kemanusiaan pada masyarakat Desa Tambarana Kecamatan Poso pesisir Utara Kabupaten Poso?
5. Bagaimanakah implementasi Indeks Desa Zakat dimensi dakwah pada masyarakat Desa Tambarana Kecamatan Poso Pesisir Utara Kabupaten Poso?

C. Definisi Operasional

Untuk mempermudah dan menghindari terjadinya perbedaan pemahaman pembaca dalam memahami arti dan maksud dari judul skripsi ini, maka akan dipaparkan secara jelas mengenai judul tersebut, sebagai berikut:

1. Implementasi

Ini berarti pelaksanaan atau penerapan atau dapat diartikan sebagai suatu tindakan atau pelaksanaan rencana yang telah disusun secara cermat dan rinci.

2. Indeks Desa Zakat

Yaitu alat yang digunakan untuk mengukur kondisi sebuah desa sehingga dapat dikatakan layak atau tidak layak menerima bantuan dana zakat. Adapun komponen Indeks Desa Zakat terdiri dari lima dimensi yaitu dimensi ekonomi, dimensi kesehatan, dimensi pendidikan, dimensi sosial dan kemanusiaan, serta dimensi dakwah.

D. Penelitian Terdahulu

Ada beberapa sumber yang telah diteliti terlebih dahulu yang berkaitan dengan penelitian ini, yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Alfam Jamil (2018) Mahasiswa UIN Raden Fatah Palembang dengan Judul Jurnal “Implementasi Indeks Desa Zakat Pada Desa Sungai Dua Kecamatan Rambutan”. Jenis penelitian ini menggunakan *mixed method research* yaitu menggabungkan antara penelitian kualitatif dan kuantitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Indeks Desa Zakat di Desa Sungai Dua sebesar 0,65. Nilai indeks tersebut berada diantara skor 0,61 - 0,80 yang berarti, desa tersebut dikategorikan baik dan tidak diprioritaskan untuk dibantu.
2. Farikhatusholikhah (2018) Mahasiswa Institut Pertanian Bogor dengan Judul Skripsi “Implementasi Indeks Desa Zakat Dalam Mendukung Program *Zakat Community Development* Di Desa Bedono Kabupaten Demak”. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan nilai Indeks

Desa Zakat di Desa Bedono Kecamatan Sayung Kabupaten Demak sebesar 0,49. Nilai tersebut menunjukkan bahwa kondisi desa secara keseluruhan dinilai cukup baik, sehingga dapat dipertimbangkan untuk dibantu.

3. Novi Herdayanti (2018) Mahasiswi Institut Pertanian Bogor dengan Judul Skripsi “Pengukuran Indeks Desa Zakat Dalam Mendukung Program *Zakat Community Development* (Studi Kasus: Desa Popongan Kabupaten Semarang)”. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan kuantitatif dan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan penghitungan Indeks Desa Zakat keseluruhan sebesar 0.56. Angka indeks tersebut berada pada skor antara 0.41–0.60 yang berarti desa tersebut secara umum kondisinya dinilai cukup baik dan secara indeks tidak diprioritaskan tetapi dapat dipertimbangkan untuk dibantu dana zakat dalam pelaksanaan program *Zakat Community Development* (ZCD).
4. Sri Maulida, Rizali, dan Akhsanul Rahmatullah (2018) Mahasiswa Universitas Lambung Mangkurat dengan Jurnal yang berjudul “*The Implementation of Indeks Desa Zakat (IDZ) for Priority Areas of the Zakat Community Development (ZCD) Program for the Empowerment of Productive Mustahiq in South Kalimantan*”. Penelitian ini menggunakan metode Indeks Desa Zakat dalam menghitung, menilai dan mengevaluasi. Hasil penelitian ini menunjukkan nilai Indeks Desa Zakat di Desa Beruntung Jaya Provinsi Kalimantan Selatan sebesar 0,48. Dimana nilai tersebut menunjukkan bahwa kondisi desa secara keseluruhan dinilai cukup baik, sehingga dapat dipertimbangkan untuk dibantu.

5. Tim BAZNAS (2018) telah melakukan penelitian tentang Indeks Desa Zakat pada tiga desa. Hasil pengukuran Indeks Desa Zakat (IDZ) tersebut menunjukkan bahwa Desa Teluk Payo memperoleh angka 0,47 yang dikategorikan cukup baik dan dapat dipertimbangkan untuk dibantu. Adapun Indeks Desa Zakat pada Desa Mendah adalah 0,34. Nilai ini menunjukkan bahwa desa tersebut diprioritaskan untuk dibantu dengan dana zakat. sedangkan Indeks Desa Zakat pada Desa Pelakat adalah 0,62 yang dikategorikan baik dan diinterpretasikan sebagai desa yang kurang diprioritaskan untuk dibantu.

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini dapat diuraikan, sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui implementasi Indeks Desa Zakat dimensi ekonomi pada masyarakat Desa Tambarana Kecamatan Poso Pesisir Utara Kabupaten Poso.
- b. Untuk mengetahui implementasi Indeks Desa Zakat dimensi kesehatan pada masyarakat Desa Tambarana Kecamatan Poso Pesisir Utara Kabupaten Poso.
- c. Untuk mengetahui implementasi Indeks Desa Zakat dimensi pendidikan pada masyarakat Desa Tambarana Kecamatan Poso Pesisir Utara Kabupaten Poso.
- d. Untuk mengetahui implementasi Indeks Desa Zakat dimensi sosial dan kemanusiaan pada masyarakat Desa Tambarana Kecamatan Poso Pesisir Utara Kabupaten Poso.
- e. Untuk mengetahui implementasi Indeks Desa Zakat dimensi dakwah pada masyarakat Desa Tambarana Kecamatan Poso Pesisir Utara Kabupaten Poso.

2. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat sebagai berikut:

- a. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai masukan dan bahan pertimbangan untuk mengurangi masalah kemiskinan serta menjadi sumber informasi serta tambahan referensi mengenai perhitungan Indeks Desa Zakat (IDZ).
- b. Penelitian ini dapat memberikan gambaran mengenai status Desa Tambarana dalam menerima bantuan oleh BAZNAS.



BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. Konsep Kemiskinan

1. Pengertian Kemiskinan

Kemiskinan adalah permasalahan yang selalu dihadapi setiap bangsa dan tidak pernah ada penyelesaiannya khususnya bagi negara berkembang. Salah satu penyebab utama kegagalan dalam mengatasi kemiskinan yaitu karena mengabaikan nilai-nilai religius dan budaya lokal suatu bangsa.¹ Islam sangat memperhatikan masalah kemiskinan ini karena hal tersebut dipandang sebagai salah satu ancaman terbesar bagi keimanan.²

Sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah Swt. QS. Al-Baqarah/2: 268.

الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُم بِالْفَحْشَاءِ وَاللَّهُ يَعِدُكُم مَّغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلًا
وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

Syaitan menjanjikan (menakut-nakuti) kamu dengan kemiskinan dan menyuruh kamu berbuat kejahatan (kikir); sedang Allah menjadikan untukmu ampunan daripada-Nya dan karunia. dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengatahui.³

Jika diperhatikan dengan seksama, ajaran Islam sudah mempunyai konsep yang cukup jelas dalam mengentaskan kemiskinan. Dalam Al-Qur'an dijelaskan paling tidak ada dua konsep dalam pengentasan kemiskinan. Yang pertama yaitu

¹Nurul Huda, dkk., *Zakat Perspektif Mikro-Makro: Pendekatan Riset*, Cet. 1 (Jakarta: Kencana, 2015), h. 73.

²Yusuf Wibisono, *Mengelola Zakat Indonesia*, Cet. 1 (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), h. 22.

³Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahnya*, h. 45.

kewajiban membayar zakat dan orang yang berhak menerimanya, dan kedua dengan jalan suka rela. Allah juga menganjurkan agar berbuat baik kepada orang miskin dengan jalan memberikan derma kepadanya.⁴ Dengan adanya zakat, diharapkan dapat menjadi sumber potensi untuk menghapuskan kemiskinan tersebut.⁵

Kemiskinan adalah situasi yang serba terbatas yang terjadi bukan atas kehendak orang yang bersangkutan. Suatu penduduk dikatakan miskin bila ditandai oleh rendahnya tingkat pendidikan, produktivitas kerja, pendapatan, kesehatan dan gizi serta kesejahteraan hidupnya, yang menunjukkan lingkaran ketidakberdayaan.⁶

B. Konsep Zakat

1. Pengertian Zakat

Zakat berarti suci, tumbuh, bertambah, dan berkah. Dengan demikian zakat berarti membersihkan diri seseorang dan hartanya, menambah pahala, harta tumbuh (berkembang), dan membawa berkah.⁷ Zakat sangat besar manfaatnya dalam kehidupan manusia karena dengan adanya zakat, orang lemah dapat

⁴Siti Mujiatun, "Analisis Pelaksanaan Zakat Profesi: Upaya Pengentasan Kemiskinan di Kota Medan", *Jurnal At-Tawassuth* Vol. 1, No. 1 (2016), h. 30.

⁵Hanik Mariana, "Korelasi Zakat Dengan Perilaku Konsumen dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Banyudono Ponorogo", *Jurnal Muslim Heritage* Vol. 1, No. 1 (2016), h. 62.

⁶Umi Hani'in, "Pengaruh Zakat Produktif Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Miskin di Kabupaten Sragen", *Tesis* (Surakarta: Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 2017), h. 45.

⁷M. Ali Hasan, *Zakat dan Infak: Salah satu Solusi Mengatasi Problema Sosial di Indonesia*, Cet. 1 (Jakarta: Kencana, 2006), h. 15.

memperoleh bantuan dan si kaya dapat mengembangkan, membersihkan, dan menyuburkan harta bendanya.⁸

Zakat juga memiliki peran yang sangat luas. Salah satunya yaitu peran terhadap pengurangan angka kemiskinan masyarakat. Zakat dikumpulkan kepada amil zakat yang selanjutnya dikelola dengan baik yang akhirnya dapat didistribusikan kepada *mustahiq*.⁹ Dengan demikian, *mustahiq* diharapkan akan menjadi *muzakki*. Sehingga angka kemiskinan di masyarakat dapat berkurang dengan adanya perubahan status tersebut.

Zakat merupakan ibadah yang dilakukan oleh seorang muslim yang bertujuan untuk menggapai ridho Allah, dengan niat yang ikhlas agar diterima. Harta yang dikeluarkan zakatnya harus berkah, tumbuh, berkembang dan bertambah serta suci dan baik.

Sebagaimana dalam firman Allah Swt. QS. At-Taubah/9: 103.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ
وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

Terjemahnya:

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.¹⁰

⁸Zainuddin, *Hukum Zakat: Perspektif Normatif, Kesejahteraan dan Keadilan Sosial*, Cet. 1 (Makassar: Alauddin University Press, 2013), h. 48.

⁹Ali Ridlo, "Zakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam", *Jurnal Penelitian Al-Adl* Vol. 7, No. 1 (2014), h. 120.

¹⁰Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Al-Karim dan terjemahnya*, h. 203.

Kata ambillah menunjukkan bahwa dalam sebuah negara harus ada lembaga khusus yang mengurus zakat. Mereka bertugas memungut zakat dari orang-orang yang telah diwajibkan berzakat yang kemudian dikelola secara amanah dan professional untuk disalurkan kepada yang berhak, baik dalam bentuk pemberian secara tunai maupun dalam bentuk program pemberdayaan dan pengentasan kemiskinan.¹¹

Dapat dikatakan bahwa zakat adalah kewajiban sosial, tolong-menolong antara orang kaya dan orang miskin yang bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan, menciptakan keamanan dan ketenteraman.¹² Zakat juga bertujuan mengurangi ketimpangan sosial yang disebabkan oleh kekayaan yang tidak merata dengan mendistribusikannya kepada mereka yang memenuhi syarat dan harus didistribusikan lebih selektif agar lebih bermanfaat dan tidak sia-sia¹³

2. Syarat-Syarat Wajib Zakat

a. Islam

Maksudnya orang yang mengeluarkan zakat adalah orang Islam, non muslim atau yang bukan orang Islam tidak wajib mengeluarkan zakat.¹⁴

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ALAUDDIN
M A K A S S A R

¹¹Muhammad Syafi'ei el-Bantanie, *Zakat, Infak, dan sedekah*, Cet. 2 (Bandung: Salamadani, 2011), h. 38.

¹²Abdurrachman Qadir, *Zakat: Dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial*, Cet. 2 (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2001), h. 76.

¹³Fairuz Maryam Naimah & Arie Rachmat Soenjoto, "Productive Zakat Distribution Effect on Micro Small and Medium Enterprises Empowerment (Case Study: BAZNASYogyakarta)", *Journal of Islamic Economics and Philanthropy (JIEP)* Vol. 1, No. 3 (2018), h. 28.

¹⁴Rahmawati Muin, *Manajemen Zakat*, Cet. 1 (Samata: Alauddin University Press, 2011), h. 13.

b. Merdeka

Menurut kesepakatan ulama zakat tidak wajib atas seorang hamba sahaya, karena hamba sahaya tidak mempunyai hak kepemilikan.

c. Baliqh dan berakal

Maksudnya zakat tidak wajib diambil dari seorang anak kecil dan orang gila, karena keduanya tidak termasuk dalam ketentuan orang yang wajib mengerjakan ibadah.

3. Tujuan Zakat

Yusuf al-Qardhawi membagi tujuan zakat menjadi tiga, yaitu dari pihak para wajib zakat (*muzakki*), pihak penerima zakat (*mustahiq*) dan dari kepentingan masyarakat (sosial).¹⁵ Tujuan bagi para wajib zakat (*muzakki*) yaitu untuk mensucikan diri dari sifat bakhil, rakus, egoistis dan sejenisnya, selain itu melatih jiwa untuk bersikap terpuji, seperti bersyukur atas nikmat Allah dan mengobati bathin dari sikap berlebihan mencintai harta.¹⁶

Tujuan bagi penerima zakat (*mustahiq*) yaitu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, terutama kebutuhan primer sehari-hari dan mensucikan hati mereka dari rasa dengki apabila melihat orang kaya yang bakhil.¹⁷ Adapun tujuan bagi kepentingan masyarakat (sosial) antara lain bahwa zakat bernilai ekonomik, merealisasi fungsi harta dan mewujudkan keadilan sosial ekonomi masyarakat.¹⁸

¹⁵Rahmawati Muin, *Manajemen Zakat*, Cet. 1, h. 18.

¹⁶Rahmawati Muin, *Manajemen Zakat*, Cet. 1, h. 19.

¹⁷Marpuah, "Potensi Filantropi Keagamaan melalui Pemberdayaan Zakat: Studi Tentang Potensi *Muzakki* dan *Mustahik* di BAZNAS", *Jurnal PENAMAS* Vol. 29, No. 3 (2016), h. 480.

¹⁸Muhammad Taisir, "Problematisasi Pendistribusian Zakat dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat", *Jurnal el HIKMAH* Vol. 10, No. 2 (2016), h. 190.

4. Hikmah Zakat

Zakat memiliki hikmah yang begitu besar, hikmah bagi orang yang mengeluarkan zakat yaitu sebagai berikut:

a. Membersihkan diri dan menyucikan harta

Dalam harta kita ada hak orang lain yang harus dikeluarkan. Jika tidak dikeluarkan maka akan menjadi seperti virus yang menulari harta kita. Dengan mengeluarkan zakat pada harta tersebut berarti kita telah menyucikan harta itu dari hak orang lain yang sudah semestinya diberikan.

b. Membuat hati menjadi tenang

Dengan mengeluarkan zakat, kita akan merasa tenang. Hal ini dikarenakan kita telah melaksanakan perintah Allah dan orang lain telah menerima apa yang menjadi haknya.

c. Membuat harta semakin bertambah

Keuntungan dengan membayar zakat yaitu harta yang kita miliki semakin tumbuh dan berkembang. Dan dengan mengeluarkan zakat artinya harta kita telah menjadi bersih dan suci.

d. Sebagai tabungan pahala di akhirat

Membayar zakat merupakan amal saleh yang mendatangkan pahala yang besar yang merupakan tabungan bagi kita di akhirat kelak.¹⁹

Adapun hikmah yang besar bagi orang yang menerimanya adalah sebagai berikut:

¹⁹Muhammad Syafi'ei el-Bantanie, *Zakat, Infak, dan sedekah*, Cet. 2, h. 52.

a. Membantu meringankan beban hidup

Zakat dapat membantu orang-orang yang sedang mendapat kesusahan dalam hidupnya, melunaskan utang bagi orang-orang yang terlilit utang, menolong orang yang sedang dalam perantauan, sampai orang tua jompo.

b. Membantu *mustahiq* untuk mandiri

Dana zakat dapat dialokasikan untuk program pembinaan dan pembiayaan produktif bagi orang yang tidak mampu dan memiliki potensi. Setelah dilakukannya pembinaan dan diberikan bantuan maka diharapkan mereka bisa mandiri.

c. Memperkuat keimanan *mustahiq*

Dengan adanya zakat, orang yang tidak mampu akan tercegah dari suatu tindakan melanggar ajaran agama, hati mereka menjadi tenang karena Islam memerhatikan nasib mereka.²⁰

Selain itu juga terdapat hikmah zakat bagi masyarakat secara keseluruhan yaitu sebagai berikut:

- a. Menciptakan hubungan yang harmonis antara orang yang mampu dan orang yang tidak mampu.
- b. Mewujudkan pemerataan ekonomi.
- c. Dengan adanya zakat, dakwah tentang Islam dapat diperluas.²¹

²⁰Muhammad Syafi'ei el-Bantanie, *Zakat, Infak, dan sedekah*, Cet. 2, h. 54.

²¹Muhammad Syafi'ei el-Bantanie, *Zakat, Infak, dan sedekah*, Cet. 2, h. 55.

5. Orang-Orang Yang Menerima Zakat (*Mustahiq*)

Dalam praktiknya, zakat harus diatur dan ditetapkan oleh agama dan negara, baik dari segi jenis harta yang dikeluarkan, para wajib zakat maupun para penerima zakat sampai pada pengelolaannya oleh pihak ketiga.²²

Ketentuan tentang siapa yang berhak menerima zakat telah diatur dengan jelas dalam firman Allah Swt. QS. At-Taubah/9: 60.

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

Terjemahnya:

Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.²³

Adapun penjelasannya mengenai ayat tersebut di atas adalah sebagai berikut:

- Orang fakir, yaitu orang yang penghasilannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari pada taraf yang paling minimal sekalipun.
- Orang miskin, yaitu orang yang penghasilannya hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup (yang pokok) sehari-hari pada taraf yang paling minimal.
- Amil zakat, yaitu lembaga atau perorangan yang mengelola zakat.

²²Murtadho Ridwan, "Analisis Implementasi Regulasi Zakat", *Jurnal Yudisia* Vol. 7, No. 2 (2016), h. 471.

²³Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahnya*, h. 196.

- d. Muallaf, yaitu orang yang baru masuk Islam.
- e. *Riqab*, yaitu untuk memerdekakan hamba sahaya (budak). Zakat juga dapat diberikan untuk menebus orang-orang Islam yang ditawan oleh musuh dan juga dapat diberikan untuk membantu negara Islam yang berusaha melepaskan diri dari belenggu penjajahan modern, seperti negara Palestina yang dikepung oleh kaum kafir Israel.²⁴
- f. *Gharimin*, yaitu untuk membebaskan beban orang yang berhutang untuk kepentingan kebaikan.
- g. *Sabilillah*, yaitu untuk kepentingan di jalan Allah. Makna *sabilillah* disini adalah para sukarelawan yang terputus bekalnya karena kefakiran mereka, sehingga mereka tidak mampu bergabung dengan tentara Islam.²⁵
- h. *Ibnussabil*, yaitu orang dalam perjalanan yang kehabisan bekal dan perjalanan tersebut untuk tujuan kebaikan, seperti mahasiswa atau santri yang menuntut ilmu di luar kota.²⁶

C. Pendayagunaan Zakat

Zakat merupakan pranata keagamaan yang berfungsi untuk mewujudkan keadilan sosial bagi umat manusia dengan memperhatikan dan meningkatkan kepedulian terhadap masyarakat yang kurang mampu. Zakat merupakan instrumen ekonomi yang diperuntukkan sebagai pengurang kesenjangan ekonomi atau kemiskinan yang terjadi di masyarakat.²⁷ Salah satu instrumen untuk mengurangi kemiskinan adalah zakat yang melalui program pendayagunaan oleh lembaga

²⁴Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah*, Cet. 1 (Jakarta: Rajawali pers, 2016), h. 348.

²⁵Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah*, h. 349.

²⁶Fordebi & Adesy, *Ekonomi dan Bisnis Islam: Seri Konsep dan Aplikasi Ekonomi dan Bisnis Islam*, Cet. 1 (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 406.

²⁷Zainuddin, *Hukum Zakat: Perspektif Normatif, Kesejahteraan dan Keadilan Sosial*, h. 49.

pengelola zakat. Dimana zakat yang dikumpulkan harus segera disalurkan kepada para *mustahiq*.

Pendayagunaan dana zakat memiliki beberapa tujuan sebagai berikut:

1. Memperbaiki taraf hidup. Masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan menjadi fokus utama pendayagunaan dana zakat untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat tersebut. Hal tersebut dapat dilakukan dengan memberikan keterampilan dan juga modal untuk melakukan usaha produktif.
2. Pendidikan dan beasiswa. Dana zakat dapat disalurkan dalam bentuk bantuan pengembangan infrastruktur dan pengembangan fasilitas pendidikan dan juga dalam bentuk bantuan biaya sekolah bagi anak-anak.
3. Mengatasi masalah ketenagakerjaan dan pengangguran. Dengan adanya program pendayagunaan dana zakat tersebut diharapkan mampu mengurangi angka pengangguran yang terjadi.
4. Program pelayanan kesehatan. Dana zakat yang dimanfaatkan untuk program ini dapat berupa pendirian poliklinik atau pusat pelayanan kesehatan di pedesaan dan juga dapat membantu menanggung biaya perawatan dan pengobatan bagi *mustahiq*.
5. Panti asuhan. Dana zakat dapat digunakan untuk memberikan bantuan kepada berbagai yayasan yang sudah menanggulangi anak-anak terlantar.
6. Sarana peribadatan. Dana zakat dapat digunakan untuk keperluan pembangunan sarana peribadatan.

Zakat juga dapat dijadikan sebagai salah satu bentuk modal bagi usaha kecil yang sangat besar pengaruhnya dalam kehidupan umat khususnya di bidang

ekonomi. Pengaruh zakat yang lainnya juga yaitu terjadinya pembagian pendapatan secara adil kepada masyarakat Islam.²⁸

D. Zakat Community Development (ZCD)

Sebagai upaya dalam mengatasi kemiskinan, BAZNAS telah mendirikan program *Zakat Community Development (ZCD)*. Dimana program tersebut berupaya memberdayakan masyarakat dengan menargetkan kehidupan *mustahiq* di desa-desa yang terbelakang dalam hal kemakmuran, fasilitas, dan infrastrukturnya. Program ini bertujuan untuk memungkinkan anggota komunitas *mustahiq* untuk saling membantu mengelola dana yang disediakan BAZNAS, sehingga kesejahteraan mereka dapat ditingkatkan.²⁹

Zakat Community Development (ZCD) adalah program pengembangan komunitas dengan mengintegrasikan aspek sosial (pendidikan, kesehatan, agama, lingkungan, dan aspek sosial lainnya) dan aspek ekonomi secara komprehensif yang pendanaan utamanya bersumber dari zakat, infak, dan sedekah.³⁰

E. Indeks Desa Zakat (IDZ)

Zakat dibagikan kepada *mustahiq* untuk dimanfaatkan secara langsung, dengan begitu realisasi zakat tidak akan jauh dari pemenuhan sembako bagi kelompok delapan *asnaf*. Hanya saja yang menjadi persoalan kemudian adalah seberapa besar dana zakat yang bisa diberikan kepada seorang *mustahiq*, apakah untuk kebutuhannya sepanjang tahun ataukah hanya untuk memenuhi kebutuhan

²⁸Abdul Haris Romdhoni, "Zakat Dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* Vol. 3, No. 1 (2017), h. 47.

²⁹Sri Maulida, dkk., "The Implementation of Indeks Desa Zakat (IDZ) for Priority Areas of the Zakat Community Development (ZCD) Program for the Empowerment of Productive Mustahiq in South Kalimantan", *International Journal of Zakat* Vol. 3, No. 3 (2018), h. 1.

³⁰Rinol Sumantri, "Efektifitas Dana Zakat Pada Mustahiq Zakat Community Development Sumatera Selatan Dengan Pendekatan Cibest", *Jurnal I-Economic* Vol. 3, No. 2 (2017), h. 211.

makan satu hari satu malam.³¹ Untuk itu diperlukan adanya alat ukur untuk menilai suatu masyarakat, layak atau tidak diberikan dana zakat.

Indeks Desa Zakat (IDZ) merupakan sebuah alat mekanisme yang digunakan untuk mengukur (*assessment*) kondisi sebuah desa sehingga dapat dikatakan layak atau tidak layak dibantu oleh dana zakat. Oleh karena itu Indeks Desa Zakat juga dapat digunakan sebagai alat *monitoring* dan evaluasi atas proses pengelolaan zakat di suatu desa. IDZ disusun berdasarkan prinsip *Process-Oriented* yang dapat digunakan oleh organisasi pengelola zakat untuk melihat perkembangan programnya pada proses yang berlangsung. Penyusunan IDZ ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi organisasi pengelola zakat yang akan atau sedang melaksanakan program pemberdayaan berbasis desa atau komunitas tertentu agar lebih terukur dan integral dalam pengelolaannya.³²

Penyusunan IDZ dilakukan dengan menggunakan penelitian berbasis *Mixed Methods*, yaitu sebuah metodologi penelitian yang mengintegrasikan metode kuantitatif dan kualitatif. Kajian ini memuat metode kualitatif yang digunakan dalam menyusun komponen pembentuk Indeks Desa Zakat, sedangkan metode kuantitatif digunakan dalam membentuk model estimasi penghitungannya. Adapun komponen pembentuk IDZ terdiri dari lima dimensi yaitu ekonomi, kesehatan, Ppendidikan, sosial dan kemanusiaan, dan dakwah. Berdasarkan masing-masing dimensi diturunkan lagi menjadi 15 variabel dan 39 indikator dengan bobot kontribusinya.³³

³¹M. Arief Mufraeni, *Akuntansi dan Manajemen Zakat: Mengomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan*, Cet. 1 (Jakarta: Kencana, 2006), h. 155.

³²PUSKAS BAZNAS, *Indeks Desa Zakat: Dari Desa Untuk Zakat Yang Terukur Dan Berkemajuan*, h. viii.

³³PUSKAS BAZNAS, *Indeks Desa Zakat: Dari Desa Untuk Zakat Yang Terukur Dan Berkemajuan*, h. viii.

Teknik estimasi penghitungan untuk memperoleh nilai IDZ menggunakan metode *Multi-Stage Weighted Index*. Metode ini menggabungkan setiap tahap pembobotan di masing-masing komponen penyusun indeks. Sehingga pembobotan harus dilakukan secara bertahap dan bersifat prosedural. Proses pembobotan dilakukan setelah diperoleh indeks pada setiap variabelnya dengan mengikuti rumusan sebagai berikut:³⁴

$$Indikator_x = \frac{(Skor_x - Skor_{min})}{(Skor_{max} - Skor_{min})}$$

Indikator_x = Nilai indikator *x*

Skor_x = Skor pada indikator *x*

Skor_{min} = 1 (nilai paling kecil)

Skor_{max} = 5 (nilai paling besar)

Nilai Indeks Desa Zakat yaitu berkisar antara 0 dan 1. Semakin nilai IDZ mendekati 1 maka desa tersebut semakin tidak diprioritaskan untuk dibantu. Sebaliknya, semakin IDZ mendekati 0 maka desa tersebut semakin diprioritaskan untuk dibantu.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

³⁴PUSKAS BAZNAS, *Indeks Desa Zakat: Dari Desa Untuk Zakat Yang Terukur Dan Berkemajuan*, h. ix.

Tabel 2.1

Komponen Indeks Desa Zakat (IDZ)

DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR
Ekonomi	Kegiatan Ekonomi Produktif	<ul style="list-style-type: none"> Memiliki diversifikasi produk unggulan/ sentra produksi (didefinisikan) Tingkat partisipasi angkatan kerja Terdapat komunitas penggiat industri kreatif
	Pusat Perdagangan Desa	<ul style="list-style-type: none"> Terdapat pasar sebagai sarana perdagangan dan penyedia kebutuhan masyarakat baik tradisional dan <i>online (online marketing)</i> Terdapat tempat berdagang (komplek pertokoan, minimarket, warung, pusat jajanan/ pujasera/ pusat kuliner)
	Akses Transportasi dan Jasa Logistik/ Pengiriman	<ul style="list-style-type: none"> Aksesibilitas jalan desa Terdapat moda transportasi umum Terdapat jasa logistik/ pengiriman barang
	Akses Lembaga Keuangan	<ul style="list-style-type: none"> Tersedianya dan teraksesnya lembaga keuangan Syariah dan konvensional Keterlibatan masyarakat terhadap rentenir Tingkat pengguna jasa/ layanan lembaga keuangan
Kesehatan	Kesehatan Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> Ketersediaan fasilitas air bersih untuk mandi dan cuci di setiap rumah Ketersediaan fasilitas kamar mandi dan jamban di dalam rumah Sumber air minum
	Pelayanan Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> Tersedia sarana Puskesmas/ Poskesdes Tersedia sarana Polindes Tersedia sarana Posyandu Ketersediaan dokter/ bidan bersertifikat
	Jaminan Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> Tingkat kepesertaan BPJS di masyarakat

Pendidikan	Tingkat Pendidikan dan Literasi	<ul style="list-style-type: none"> • Tingkat pendidikan penduduk desa • Masyarakat dapat membaca dan berhitung
	Fasilitas Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> • Tersedia sarana dan prasarana belajar • Akses ke sekolah terjangkau dan mudah • Ketersediaan jumlah guru yang memadai
Sosial dan Kemanusiaan	Sarana Ruang Interaksi Terbuka Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> • Ketersediaan sarana olahraga • Terdapat kelompok kegiatan warga (badan permusyawaratan desa, pengajian, karang taruna, arisan, dll)
	Infrastruktur Listrik, Komunikasi dan Informasi	<ul style="list-style-type: none"> • Ketersediaan aliran listrik • Terdapat akses komunikasi (handphone) • Terdapat akses internet • Terdapat siaran televisi atau radio
	Mitigasi Bencana Alam	<ul style="list-style-type: none"> • Penanggulangan bencana
Dakwah	Tersedianya Sarana & Pendamping Keagamaan	<ul style="list-style-type: none"> • Tersedianya Masjid di lingkungan masyarakat • Akses ke Masjid • Terdapat pendamping keagamaan (ustadz/ustadzah, dll)
	Tingkat Pengetahuan Agama Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> • Tingkat literasi Al-Qur'an masyarakat • Kesadaran masyarakat untuk zakat dan infak (berbagi kepada sesama manusia)
	Tingkat Aktifitas Keagamaan dan Partisipasi Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> • Terselenggaranya kegiatan rutin keagamaan • Tingkat partisipasi masyarakat untuk sholat 5 waktu berjamaah • Tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan rutin keagamaan (pengajian mingguan, atau bulanan)

Sumber: PUSKAS BAZNAS 2017

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Lokasi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif merupakan sebuah metode penelitian yang bertujuan menggambarkan fenomena atau gejala sosial yang terjadi di masyarakat atau menganalisis hubungan fenomena atau gejala sosial di masyarakat tersebut.¹

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang akan dijadikan sebagai tempat pelaksanaan penelitian yaitu berlokasi di Desa Tambarana Kecamatan Poso Pesisir Utara Kabupaten Poso.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif yang bertujuan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan suatu kondisi atau fenomena apa adanya. Dalam pendekatan deskriptif, para peneliti tidak melakukan manipulasi atau memberikan perlakuan tertentu terhadap objek penelitian.²

Pendekatan deskriptif yang paling umum digunakan adalah penilaian sikap atau pendapat terhadap individu, organisasi, keadaan, ataupun prosedur tertentu. Data deskriptif umumnya dikumpulkan melalui suatu daftar pertanyaan yang dilakukan melalui survei, wawancara ataupun observasi.³

¹Sudaryono, *Metodologi Penelitian*, Cet. 1 (Jakarta: Rajawali Pres, 2017), h. 92.

²Sudaryono, *Metodologi Penelitian*, Cet. 1, h. 82.

³Mudrajad Kuncoro, *Metode Riset Untuk Bisnis & Ekonomi*, Ed. 4 (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2013), h. 12.

C. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data primer dan data sekunder. Sumber data yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer adalah sumber data yang pada umumnya belum tersedia, sehingga peneliti harus mengumpulkannya sendiri sesuai dengan kebutuhannya.⁴ Data primer dapat diperoleh dari hasil wawancara dan *Focus Group Discussion* (FGD). Pada tahapan FGD, narasumber terdiri dari beberapa latar belakang yaitu pemerintah, organisasi non-profit yang bergerak pada bidang kemanusiaan, dan lembaga zakat. Ini dilakukan untuk menajamkan dimensi, indikator, dan variabel pada Indeks Desa Zakat (IDZ) agar komponen yang dihasilkan dapat dihitung, relevan, dan dapat diaplikasikan.⁵ Data primer digunakan untuk mengetahui kondisi umum desa berdasarkan lima dimensi, yaitu dimensi ekonomi, kesehatan, pendidikan, sosial kemanusiaan, dan dakwah.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dalam bentuk sudah jadi, sudah dikumpulkan dan diolah oleh pihak lain dan biasanya sudah dalam bentuk publikasi.⁶ Data sekunder dapat berupa, *database* kelembagaan dan administrasi lainnya yang bertujuan untuk mengukur nilai Indeks Desa Zakat. Data ini digunakan untuk melengkapi informasi yang dibutuhkan dalam penelitian.

⁴Danang Sunyoto, *Metodologi Penelitian Akuntansi*, Cet. 1 (Bandung: PT Refika Aditama, 2013), h. 21.

⁵PUSKAS BAZNAS, *Indeks Desa Zakat: Dari Desa Untuk Zakat Yang Terukur Dan Berkemajuan*, h. 2.

⁶Suryani dan Hendryadi, *Metode Riset Kuantitatif: Teori dan Aplikasi Pada Penelitian Bidang Manajemen dan Ekonomi Islam*, Cet. 1 (Jakarta: Kencana, 2015), h. 181.

D. Metode Pengumpulan Data

1. Metode Wawancara

Wawancara merupakan cara untuk memperoleh informasi secara langsung yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang bertugas menyampaikan pertanyaan dan responden yang memberikan informasi dari semua pertanyaan tersebut.⁷

2. Metode Dokumentasi

Dokumentasi bertujuan untuk memperoleh data langsung dari lokasi penelitian baik secara tertulis maupun berbentuk gambar.⁸ Dokumentasi bertujuan untuk mengungkap kembali jika diperlukan dalam proses analisa atau pembandingan lainnya.

E. Instrument Penelitian

Instrument penelitian merupakan alat bantu yang digunakan oleh peneliti dalam melaksanakan penelitian. Adapun alat bantu yang digunakan peneliti antara lain adalah:

1. Pedoman wawancara adalah alat yang berisikan daftar pertanyaan yang digunakan dalam melakukan wawancara.
2. Buku catatan dan alat tulis yaitu alat yang digunakan untuk mencatat hasil percakapan yang dianggap penting.
3. Kamera adalah alat yang berfungsi untuk memotret saat berlangsungnya proses wawancara.

⁷Sudaryono, *Metodologi Penelitian*, Cet. 1, h. 212.

⁸Sudaryono, *Metodologi Penelitian*, Cet. 1, h. 219.

4. Perekam suara yaitu alat yang digunakan untuk merekam percakapan saat wawancara sehingga informasi yang didapatkan menjadi lebih akurat dan objektif.

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan analisis kuantitatif. Pendekatan analisis kuantitatif menggunakan teknik estimasi penghitungan yang dinamakan *Multi-Stage Weigh Index* digunakan untuk menampilkan data berupa hasil perhitungan IDZ. Metode pengumpulan data kuantitatif yang digunakan untuk menghitung nilai komponen indeks zakat yaitu indikator, variabel, dan dimensi sehingga proses penghitungannya harus dilakukan secara bertahap.⁹

G. Komponen Indeks Desa Zakat (IDZ)

Secara umum komponen Indeks Desa Zakat (IDZ) dibentuk oleh 5 dimensi yaitu dimensi ekonomi, kesehatan, pendidikan, kemanusiaan, dan dakwah sesuai dengan bidang penyaluran zakat yang dilakukan BAZNAS. Masing-masing dimensi memiliki beberapa variabel dan indikator yang akan menjadi acuan untuk dihitung indeksnya.¹⁰ Komponen Indeks Desa Zakat (IDZ) dapat dilihat pada Tabel 3.1.

⁹PUSKAS BAZNAS, *Indeks Desa Zakat: Dari Desa Untuk Zakat Yang Terukur Dan Berkemajuan*, h. 2-3.

¹⁰PUSKAS BAZNAS, *Indeks Desa Zakat: Dari Desa Untuk Zakat Yang Terukur Dan Berkemajuan*, h. 7.

Tabel 3.1

Komponen Indeks Desa Zakat (IDZ)

DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR
Ekonomi	Kegiatan Ekonomi Produktif	<ul style="list-style-type: none"> Memiliki diversifikasi produk unggulan/ sentra produksi (didefinisikan) Tingkat partisipasi angkatan kerja Terdapat komunitas penggiat industri kreatif
	Pusat Perdagangan Desa	<ul style="list-style-type: none"> Terdapat pasar sebagai sarana perdagangan dan penyedia kebutuhan masyarakat baik tradisional dan <i>online (online marketing)</i> Terdapat tempat berdagang (komplek pertokoan, minimarket, warung, pusat jajanan/ pujasera/ pusat kuliner)
	Akses Transportasi dan Jasa Logistik/ Pengiriman	<ul style="list-style-type: none"> Aksesibilitas jalan desa Terdapat moda transportasi umum Terdapat jasa logistik/ pengiriman barang
	Akses Lembaga Keuangan	<ul style="list-style-type: none"> Tersedianya dan teraksesnya lembaga keuangan Syariah dan konvensional Keterlibatan masyarakat terhadap rentenir Tingkat pengguna jasa/ layanan lembaga keuangan
Kesehatan	Kesehatan Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> Ketersediaan fasilitas air bersih untuk mandi dan cuci di setiap rumah Ketersediaan fasilitas kamar mandi dan jamban di dalam rumah Sumber air minum
	Pelayanan Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> Tersedia sarana Puskesmas/ Poskesdes Tersedia sarana Polindes Tersedia sarana Posyandu Ketersediaan dokter/ bidan bersertifikat
	Jaminan Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> Tingkat kepesertaan BPJS di masyarakat

Pendidikan	Tingkat Pendidikan dan Literasi	<ul style="list-style-type: none"> • Tingkat pendidikan penduduk desa • Masyarakat dapat membaca dan berhitung
	Fasilitas Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> • Tersedia sarana dan prasarana belajar • Akses ke sekolah terjangkau dan mudah • Ketersediaan jumlah guru yang memadai
Sosial dan Kemanusiaan	Sarana Ruang Interaksi Terbuka Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> • Ketersediaan sarana olahraga • Terdapat kelompok kegiatan warga (badan permusyawaratan desa, pengajian, karang taruna, arisan, dll)
	Infrastruktur Listrik, Komunikasi dan Informasi	<ul style="list-style-type: none"> • Ketersediaan aliran listrik • Terdapat akses komunikasi (handphone) • Terdapat akses internet • Terdapat siaran televisi atau radio
	Mitigasi Bencana Alam	<ul style="list-style-type: none"> • Penanggulangan bencana
Dakwah	Tersedianya Sarana & Pendamping Keagamaan	<ul style="list-style-type: none"> • Tersedianya Masjid di lingkungan masyarakat • Akses ke Masjid • Terdapat pendamping keagamaan (ustadz/ustadzah, dll)
	Tingkat Pengetahuan Agama Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> • Tingkat literasi Al-Qur'an masyarakat • Kesadaran masyarakat untuk zakat dan infak (berbagi kepada sesama manusia)
	Tingkat Aktifitas Keagamaan dan Partisipasi Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> • Terselenggaranya kegiatan rutin keagamaan • Tingkat partisipasi masyarakat untuk sholat 5 waktu berjamaah • Tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan rutin keagamaan (pengajian mingguan, atau bulanan)

Sumber: PUSKAS BAZNAS 2017

H. Tahapan Penghitungan Indeks Desa Zakat (IDZ)

Prosedur dan formula penghitungan Indeks Desa Zakat adalah sebagai berikut:

1. Pada setiap indikator memiliki kriteria penilaian atau yang disebut skala likert. Skala likert ini berhubungan dengan pernyataan tentang sikap seseorang terhadap sesuatu.¹¹ Skala ini terdiri dari 5 kriteria penilaian, sehingga hasil penghitungannya dimulai dari angka paling kecil yaitu 1 sampai dengan yang paling besar yaitu 5 (skala likert berada di lampiran). Semakin tinggi nilainya maka desa tersebut dianggap semakin tidak diprioritaskan untuk dibantu, dan sebaliknya semakin rendah nilainya maka desa tersebut semakin layak atau sangat diprioritaskan untuk dibantu. Kemudian setelah di dapat fakta aktual, maka dihitung indikator dengan menggunakan metode penghitungan sebagai berikut:

$$Indikator_x = \frac{(Skor_x - Skor_{min})}{(Skor_{max} - Skor_{min})}$$

Indikator_x = Nilai indikator *x*

Skor_x = Skor pada indikator *x*

Skor_{min} = 1 (nilai paling kecil)

Skor_{max} = 5 (nilai paling besar)

2. Setelah nilai setiap indikator di dapat, maka dikalikan dengan bobot masing-masing indikator untuk mendapatkan indeks indikator.
3. Kemudian indeks indikator dikelompokkan sesuai dengan variabelnya, dan dikalikan dengan bobot masing-masing variabel untuk mendapatkan indeks variabel.

¹¹Muhamad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam: Pendekatan Kuantitatif*, Cet. 1 (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), h. 154.

4. Indeks dari setiap variabel tersebut kemudian dikalikan dengan bobot pada masing-masing dimensi untuk mendapatkan indeks dimensi. Sehingga akan menghasilkan Indeks Desa Zakat (IDZ). Rumusnya adalah sebagai berikut:

$$IDZ = (X1_{ek} + X2_{ks} + X3_{pe} + X4_{ke} + X5_{da})$$

IDZ = Indeks Desa Zakat

X1.....X5 = Bobot penilaian

ek = Dimensi ekonomi

ks = Dimensi kesehatan

pe = Dimensi pendidikan

ke = Dimensi kemanusiaan

da = Dimensi dakwah¹²

Nilai Indeks Desa Zakat (IDZ) berkisar antara 0 dan 1. Hasil dari Indeks Desa Zakat (IDZ) tersebut akan dibagi ke dalam 5 kategori atau *Score Range* sebagaimana dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 3.2

***Score Range* Indeks Desa Zakat (IDZ)**

SCORE RANGE	KETERANGAN	INTERPRETASI
0,00 – 0,21	Tidak Baik	Sangat diprioritaskan untuk dibantu
0,21 – 0,40	Kurang Baik	Diprioritaskan untuk dibantu
0,41 – 0,60	Cukup Baik	Dapat dipertimbangkan untuk dibantu
0,61 – 0,80	Baik	Kurang diprioritaskan untuk dibantu
0,81 – 1,00	Sangat Baik	Tidak diprioritaskan untuk dibantu

Sumber: PUSKAS BAZNAS 2017

¹²PUSKAS BAZNAS, *Indeks Desa Zakat: Dari Desa Untuk Zakat Yang Terukur Dan Berkemajuan*, h. 9-10.

I. Pembobotan Indeks Desa Zakat (IDZ)

Proses pengukuran dan penilaian Indeks Desa Zakat (IDZ) memerlukan nilai atau bobot dari masing-masing komponen. Pembobotan Indeks Desa Zakat (IDZ) yang telah dihasilkan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.3

Pembobotan Komponen Indeks Desa Zakat (IDZ)

Dimensi	Bobot Dimensi =1	Variabel	Bobot Variabel =1	Indikator	Bobot Indikator = 1
Ekonomi	0,25	Kegiatan Ekonomi Produktif	0,28	Memiliki diversifikasi produk unggulan/ sentra produksi (didefinisikan)	0,33
				Tingkat partisipasi angkatan kerja	0,35
				Terdapat komunitas penggiat industri kreatif	0,32
				Total Bobot Indikator	1,00
		Pusat Perdagangan Desa	0,24	Terdapat pasar sebagai sarana perdagangan dan penyedia kebutuhan masyarakat baik tradisional dan <i>online</i> (<i>online marketing</i>)	0,53
				Terdapat tempat berdagang (kelompok pertokoan, minimarket, warung, pusat jajanan/ pujasera/ pusat kuliner)	0,47
				Total Bobot Indikator	1
		Akses Transportasi dan Jasa Logistik/	0,22	Aksesibilitas jalan desa	0,42
				Terdapat moda transportasi umum	0,32
				Terdapat jasa logistik/	0,26

		Pengiriman		pengiriman barang	
				Total Bobot Indikator	1
		Akses Lembaga Keuangan	0,26	Tersedianya dan teraksesnya lembaga keuangan Syariah dan konvensional	0,37
				Keterlibatan masyarakat terhadap rentenir	0,29
				Tingkat pengguna jasa/ layanan lembaga keuangan	0,34
		Total Bobot Variabel	1	Total Bobot Indikator	1
Kesehatan	0,16	Kesehatan Masyarakat	0,41	Ketersediaan fasilitas air bersih untuk mandi dan cuci di setiap rumah	0,37
				Ketersediaan fasilitas kamar mandi dan jamban di dalam rumah	0,29
				Sumber air minum	0,34
				Total Bobot Indikator	1
		Pelayanan Kesehatan	0,36	Tersedia sarana Puskesmas/ Poskesdes	0,25
				Tersedia sarana Polindes	0,25
				Tersedia sarana Posyandu	0,25
				Ketersediaan dokter/ bidan bersertifikat	0,25
				Total Bobot Indikator	1
		Jaminan Kesehatan	0,23	Tingkat kepesertaan BPJS di masyarakat	1,00
		Total Bobot Variabel	1	Total Bobot Indikator	1
Pendidikan	0,20	Tingkat Pendidikan dan Literasi	0,50	Tingkat pendidikan penduduk desa	0,48
				Masyarakat dapat membaca dan berhitung	0,52

				Total Bobot Indikator	1
		Fasilitas Pendidikan	0,50	Tersedia sarana dan prasarana belajar	0,34
				Akses ke sekolah terjangkau dan mudah	0,34
				Ketersediaan jumlah guru yang memadai	0,32
		Total Bobot Variabel	1	Total Bobot Indikator	1
Sosial dan Kemanusiaan	0,17	Sarana Ruang Interaksi Terbuka Masyarakat	0,36	Ketersediaan sarana olahraga	0,44
				Terdapat kelompok kegiatan warga (badan permusyawaratan desa, pengajian, karang taruna, arisan, dll)	0,56
				Total Bobot Indikator	1
		Infrastruktur Listrik, Komunikasi dan Informasi	0,43	Ketersediaan aliran listrik	0,32
				Terdapat akses komunikasi (handphone)	0,25
				Terdapat akses internet	0,23
				Terdapat siaran televisi atau radio	0,20
				Total Bobot Indikator	1
		Mitigasi Bencana Alam	0,21	Penanggulangan bencana	1,00
		Total Bobot Variabel	1	Total Bobot Indikator	1
Dakwah	0,22	Tersedianya Sarana & Pendamping Keagamaan	0,33	Tersedianya Masjid di lingkungan masyarakat	0,31
				Akses ke Masjid	0,32
				Terdapat pendamping keagamaan (ustadz/ustadzah, dll)	0,37

				Total Bobot Indikator	1
		Tingkat Pengetahuan Agama Masyarakat	0,30	Tingkat literasi Al-Qur'an masyarakat	0,46
				Kesadaran masyarakat untuk zakat dan infak (bernagi kepada sesama manusia)	0,54
				Total Bobot Indikator	1
		Tingkat Aktifitas Keagamaan dan Partisipasi Masyarakat	0,37	Terselenggaranya kegiatan rutin keagamaan	0,30
				Tingkat partisipasi masyarakat sholat 5 waktu berjamaah	0,39
				Tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan rutin keagamaan (pengajian mingguan, atau bulanan)	0,31
Total Bobot IDZ	1	Total Bobot Variabel	1	Total Bobot Indikator	1

Sumber: PUSKAS BAZNAS 2017

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. *Gambaran Umum Desa Tambarana*

1. Kondisi Geografis

Desa Tambarana merupakan salah satu dari 8 desa yang ada di Kecamatan Poso Pesisir Utara Kabupaten Poso yang dimana Desa Tambarana mempunyai luas wilayah 100 KM² dengan jumlah 7 (tujuh) dusun. Desa Tambarana terletak di Kecamatan Poso Pesisir Utara dengan batas-batas sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : Desa Bakti Agung
- b. Sebelah Selatan : Desa Kalora
- c. Sebelah Barat : Kecamatan Lore Utara
- d. Sebelah Timur : Teluk Tomini

2. Keadaan Penduduk

Penduduk merupakan salah satu syarat bagi terbentuknya suatu Negara atau wilayah dan sekaligus sebagai asset atau modal bagi suksesnya suatu pembangunan baik itu dari segala bidang maupun dalam bentuk pembangunan fisik dan non fisik. Maka dari itu kehadiran dan peranan penduduk sangat menentukan bagi perkembangan suatu wilayah, baik skala kecil maupun skala besar.

3. Jenis Kelamin

Jumlah warga desa laki-laki 1996 orang dan jumlah warga perempuan sebanyak 2002 orang, dan jumlah totalnya adalah sebanyak 3998 orang dengan jumlah kepala keluarga 1106 KK. Berdasarkan tingkat umur penduduk Desa

Tambarana merupakan penduduk yang terlihat dari usia 15-65 tahun berjumlah kurang lebih 2661 orang.

4. Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan merupakan salah satu alat ukur untuk melihat kemampuan masyarakat dalam hal penerimaan inovasi yang baru, selain itu pendidikan dan pengetahuan akan mempengaruhi pola pikir seseorang dalam menyelesaikan suatu pekerjaan. Masyarakat Desa Tambarana ditinjau dari pendidikannya, terlihat bahwa jumlah yang tamat SD lebih besar yaitu 539 orang dibandingkan dengan lainnya. Artinya banyak masyarakat yang hanya melakukan pendidikan sampai SD saja dan tidak melanjutkan sampai kejenjang yang lebih tinggi.

Kesejahteraan masyarakat merupakan tujuan utama yang ada di dalam pembangunan. Kesejahteraan masyarakat sendiri dapat diukur melalui dengan pendapatan masyarakat itu sendiri dalam memenuhi setiap kebutuhannya. Masyarakat Desa Tambarana kebanyakan masyarakatnya berprofesi sebagai petani dan sebagian ada juga yang sebagai nelayan. Ditinjau dari segi agama, masyarakat di Desa Tambarana terdapat tiga agama yaitu agama Islam, agama Kristen, dan agama hindu.

Adapun dalam menjalankan rutinitas keagamaan tidak lepas di tunjang dengan sarana dan prasarana yang ada, seperti masjid, pembangunan sarana peribadatan di Desa Tambarana terdapat 4 buah masjid dan 2 buah mushola yang tersebar di setiap dusun yang ada di Desa Tambarana.

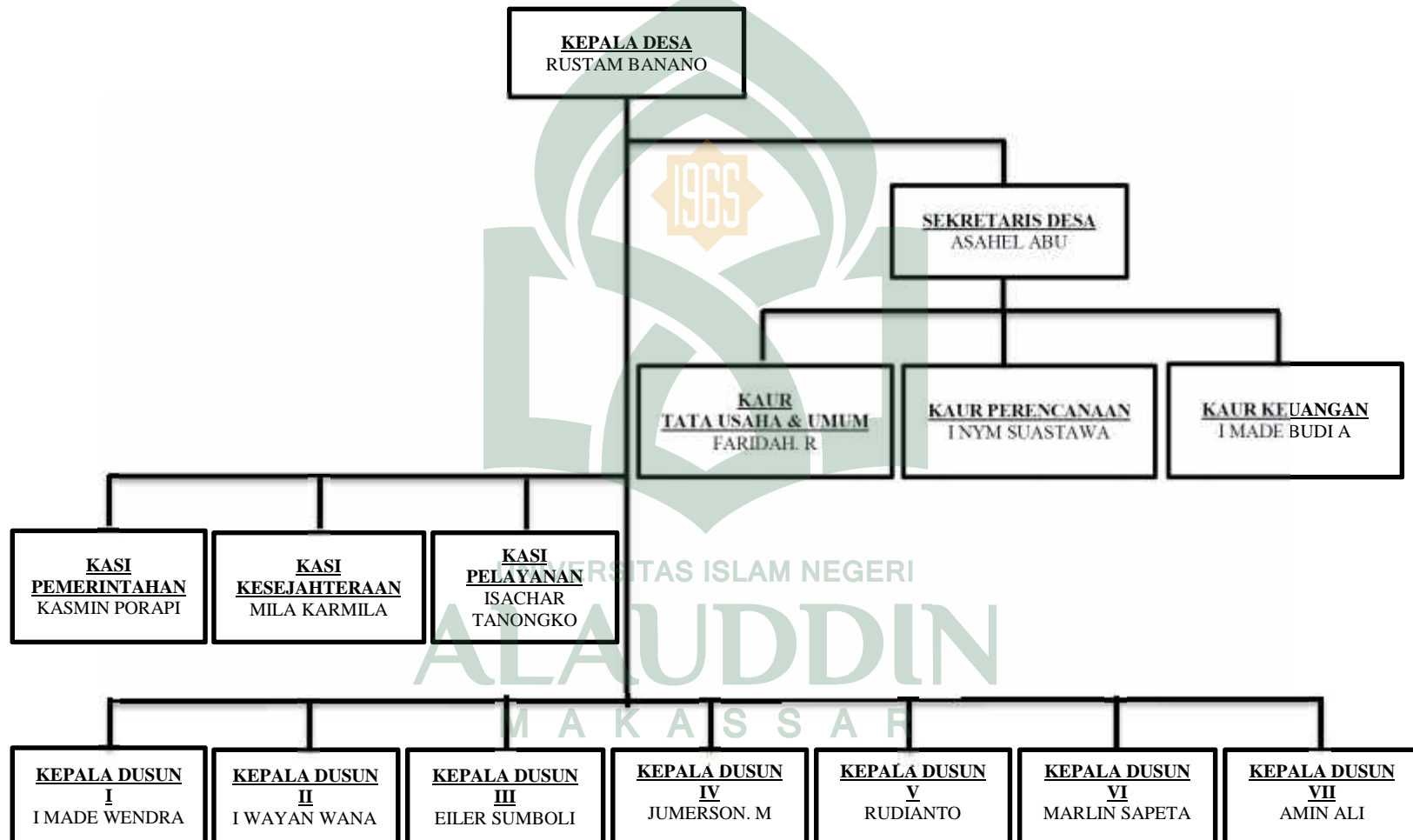
B. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa

Organisasi merupakan salah satu fungsi yang penting dalam suatu manajemen untuk mencapai suatu sasaran yang ditetapkan dalam organisasi. Dalam suatu organisasi pasti memerlukan yang namanya struktur organisasi untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pemerintah, pelayanan masyarakat dan pembangunan.

Kepala desa dalam pelaksanaan tugasnya di bantu oleh perangkat desa dan selanjutnya dibentuk pula dusun-dusun yang selanjutnya dipimpin oleh kepala dusun, RW (Rukun Warga), kemudian di bawah RW ada RT (Rukun Tetangga), berdasarkan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang.

1. Unsur pemimpin yang dipimpin oleh Kepala Desa
2. Unsur pembantu pimpinan yaitu Sekretaris
3. Unsur pelaksanaan teknis yaitu: Kasi Pemerinah, Kasi Kesejahteraan, Kasi Pelayanan, Kaur Tata Usaha dan Umum, Kaur Perencanaan, dan Kaur Keuangan
4. Unsur pelaksanaan kewilayaan yaitu: Kepala Dusun I, Kepala Dusun II, Kepala Dusun III, Kepala Dusun IV, Kepala Dusun V, Kepala Dusun VI, Kepala Dusun VII

**GAMBAR 4. 1 BAGAN STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAHAN DESA TAMBARANA
KECAMATAN POSO PESISIR UTARA KABUPATEN POSO**



C. Nilai Indeks Dimensi Ekonomi Pada Masyarakat Desa Tambarana

Dimensi ekonomi diperoleh dengan cara mengalikan indeks dari setiap variabel dengan kontribusi bobot masing-masing. Dimensi ekonomi memiliki proporsi terbesar dalam menentukan nilai Indeks Desa Zakat (IDZ), hal ini dikarenakan dalam perhitungannya bobot nilai dimensi tersebut sebesar 0,25 atau seperempat dari total pembobotan IDZ. Nilai indeks dimensi ekonomi diperoleh dari hasil perhitungan variabel dan indikator penyusunnya. Rumus yang digunakan untuk mengukur dimensi ekonomi adalah rumus tahap ketiga yaitu sebagai berikut:

$$IDZ = 0,28(X1) + 0,24(X2) + 0,22(X3) + 0,26(X4)$$

$$IDZ = 0,28(0,08) + 0,24(0,47) + 0,22(0,74) + 0,26(0,565)$$

$$IDZ = 0,0224 + 0,1128 + 0,1628 + 0,1469$$

$$IDZ = 0,44$$

Tabel 4.1

Nilai Indeks Variabel Dimensi Ekonomi

Variabel	Bobot Variabel	Indeks Variabel	Keterangan	Interpretasi
Kegiatan Ekonomi Produktif	0,28	0,08	Tidak Baik	Sangat Diprioritaskan Untuk Dibantu
Pusat Perdagangan Desa	0,24	0,47	Cukup Baik	Dapat Dipertimbangkan Untuk Dibantu
Akses Transportasi dan Jasa Logistik /Pengiriman	0,22	0,74	Baik	Kurang Diprioritaskan Untuk Dibantu
Akses Lembaga Keuangan	0,26	0,565	Cukup Baik	Dapat Dipertimbangkan Untuk Dibantu

Sumber: Data Diolah 2019

Berdasarkan tabel di atas, nilai indeks dari masing-masing variabel di dalam dimensi ekonomi adalah 0,08; 0,47; 0,74; dan 0,565. Dari hasil tersebut dapat dilihat keadaan ekonomi Desa Tambarana termasuk kedalam kategori cukup baik. Ini disebabkan oleh rendahnya nilai indikator dalam kegiatan ekonomi produktif yang menunjukkan bahwa tidak adanya komunitas penggiat industri kreatif. Variabel-variabel di bawah ini akan menjelaskan mengenai nilai dari masing-masing indikator.

1. Kegiatan Ekonomi Produktif

Variabel kegiatan ekonomi produktif terdiri dari tiga indikator, yaitu jumlah produk unggulan, tingkat partisipasi angkatan kerja, dan jumlah penggiat industri kreatif. Rendahnya kegiatan ekonomi produktif di Desa Tambarana dapat dilihat dari hasil perhitungan nilai masing-masing indikator, yaitu 0,00; 0,25 dan 0,00. Hal ini menunjukkan rendahnya produk unggulan yang dihasilkan, angka pengangguran di desa yang tinggi serta tidak adanya komunitas penggiat industri kreatif.

Berdasarkan wawancara dengan kepala desa, sebagian mata pencaharian masyarakat adalah berprofesi sebagai petani dan pekebun, ada juga yang berprofesi sebagai nelayan. Komoditas yang dibudidayakan yaitu kebanyakan adalah padi, hasil panen tersebut sebagian dikonsumsi oleh masyarakat dan sebagian lagi dijual untuk memenuhi kebutuhan lainnya.

2. Pusat Perdagangan Desa

Variabel pusat perdagangan desa terdiri dari dua indikator penyusun yaitu pasar dan pusat perdagangan. Keberadaan pasar dan pusat perdagangan di desa akan mempengaruhi kegiatan perekonomian di wilayah tersebut. Adapun nilai indeks masing-masing indikator adalah 0,00 dan 1,00. Hal ini dikarenakan di Desa

Tambarana tidak terdapat pasar sebagai sarana perdagangan dan penyedia kebutuhan masyarakat desa. Keberadaan pasar terdekat berada di Desa Bakti Agung yang terletak bersebelahan dengan Desa Tambarana yang juga dulunya merupakan bagian dari Desa Tambarana. Kegiatan ekonomi masyarakat di Desa Tambarana juga masih dilakukan secara tradisional dan belum memanfaatkan teknologi ataupun *online marketing*.

Berdasarkan wawancara dengan kepala desa terdapat kurang lebih 100 warung kecil dan termasuk juga toko sembako yang menyediakan kebutuhan sehari-hari, sedangkan minimarket belum tersedia di Desa Tambarana.

3. Akses Transportasi dan Jasa Logistik/Pengiriman

Variabel akses transportasi dan jasa logistik/pengiriman terdiri atas tiga indikator penyusun, yaitu aksesibilitas jalan desa, moda transportasi umum, dan jasa logistik/pengiriman barang. Nilai indeks indikator aksesibilitas jalan desa mencapai 1,00. Hal ini berarti akses untuk menuju desa telah tersedia. Akses jalan masuk dan keluar desa dapat dikatakan sangat baik, jalanan dapat dilalui oleh kendaraan beroda dua maupun roda empat serta jalanan sudah beraspal. Indikator moda transportasi umum juga mendapat nilai 1,00 yang artinya jalan desa dapat dilintasi oleh angkutan umum dengan trayek tetap dan dapat beroperasi setiap hari.

Sedangkan untuk indikator jasa logistik/pengiriman barang memiliki nilai indeks 0,00. Hal ini disebabkan tidak adanya sarana pengiriman barang yang terdapat di Desa Tambarana. Oleh karena itu jika masyarakat ingin melakukan pengiriman barang maka mereka harus melakukan perjalanan dengan mengendarai kendaraan sepeda motor selama kurang lebih 30 menit untuk sampai dikantor pos terdekat.

4. Akses Lembaga Keuangan

Variabel akses lembaga keuangan terdiri dari tiga indikator penyusun, yaitu ketersediaan dan aksesibilitas lembaga keuangan syariah dan konvensional, keterlibatan masyarakat terhadap rentenir serta tingkat pengguna jasa/layanan lembaga keuangan. Nilai indeks dari masing-masing indikator tersebut yaitu bernilai 0,25; 0,75 dan 0,75. Hal tersebut menunjukkan bahwa ketersediaan lembaga keuangan rendah sedangkan jumlah penduduk yang berhutang kepada rentenir dan keikutsertaan masyarakat pada produk dan jasa keuangan tergolong tinggi.

Menurut data yang disampaikan oleh ketua bidang ekonomi Desa Tambarana, keterlibatan masyarakat terhadap lembaga keuangan sebanyak 60 persen sampai 70 persen dari jumlah penduduk desa, dan masih tergolong ke dalam lembaga keuangan konvensional. Masyarakat belum mengakses lembaga keuangan syariah karena belum adanya lembaga keuangan syariah di Desa Tambarana ataupun di sekitar daerah tersebut.

D. Nilai Indeks Dimensi Kesehatan Pada Masyarakat Desa Tambarana

Porsi nilai dari dimensi kesehatan adalah 0,16 atau yang terkecil dari seluruh dimensi yang ada yang diukur dalam perhitungan Indeks Desa Zakat (IDZ). Dimensi kesehatan diperoleh dengan mengalikan indeks dari setiap variable dengan kontribusi bobot masing-masing indikator. Hasil dari perhitungan IDZ Desa Tambarana pada dimensi kesehatan adalah 0,79. hal tersebut menunjukkan bahwa kesehatan di Desa Tambarana dalam keadaan baik. Variabel yang terdapat di dalam dimensi ini meliputi kesehatan masyarakat, pelayanan kesehatan, dan jaminan kesehatan. Nilai indeks kesehatan didapat menggunakan rumus tahap ketiga sebagai berikut:

$$IDZ = 0,41(X1) + 0,36(X2) + 0,23(X3)$$

$$IDZ = 0,41(0,8425) + 0,36(0,9375) + 0,23(0,5)$$

$$IDZ = 0,3454 + 0,3375 + 0,115$$

$$IDZ = 0,79$$

Tabel 4.2

Nilai Indeks Variabel Dimensi Kesehatan

Variabel	Bobot Variabel	Indeks Variabel	Keterangan	Interpretasi
Kesehatan Masyarakat	0,41	0,8425	Sangat Baik	Tidak Diprioritaskan Untuk Dibantu
Pelayanan Kesehatan	0,36	0,9375	Sangat Baik	Tidak Diprioritaskan Untuk Dibantu
Jaminan Kesehatan	0,23	0,5	Cukup Baik	Dapat Dipertimbangkan Untuk Dibantu

Sumber: Data Diolah 2019

Berdasarkan tabel 4.6 masing-masing variabel bernilai 0,8425; 0,9375; dan 0,5. Secara umum rumah warga mayoritas layak huni dan mereka pun sudah mengakses air bersih sebagai sarana memasak, mencuci dan minum. Pelayanan kesehatan di Desa Tambarana pun sangat memadai. Variabel jaminan kesehatan menempati nilai terendah dari ketiga variabel dalam dimensi kesehatan. Pembahasan lebih lanjut mengenai nilai indeks indikatornya akan dijeelaskan pada variabel-variabel di bawah.

1. Kesehatan Masyarakat

Variabel kesehatan masyarakat terdiri dari empat indikator penyusun, yaitu ketersediaan fasilitas air bersih, ketersediaan fasilitas kamar mandi dan jamban, serta sumber air minum. Indikator tersebut masing-masing bernilai 1,00; 0,75 dan

0,75 yang artinya kondisi kesehatan masyarakat Desa Tambarana dalam kondisi yang baik.

Menurut data dari wawancara kepala desa, fasilitas air bersih untuk mandi dan mencuci sudah ada di hampir semua rumah penduduk desa, sekitar 90 persen rumah sudah memilikinya, yang tidak memiliki fasilitas air bersih hanya beberapa rumah yang berada disekitaran pantai. Sekitar 80 persen rumah penduduk sudah memiliki kamar mandi dan jamban di setiap rumah. Sumber air minum yang digunakan oleh penduduk berasal dari PAM dan sumber mata air/sumur.

2. Pelayanan Kesehatan

Terdapat empat indikator penyusun variabel pelayanan kesehatan, yaitu ketersediaan sarana puskesmas/poskesdes, ketersediaan sarana polindes, ketersediaan sarana posyandu serta ketersediaan dokter/bidan bersertifikat yang masing-masing bernilai 0,75; 1,00; 1,00 dan 1,00 yang artinya pelayanan kesehatan di desa tersebut dalam kondisi yang baik. Terdapat 1 puskesmas yang dapat di akses oleh masyarakat dengan jarak tempuh terjauh dari rumah masyarakat yaitu 3-4 km yang dapat di akses oleh 3998 penduduk. Terdapat 4 posyandu di Desa Tambarana yang dapat di akses oleh masyarakat, serta terdapat juga dokter dan bidan yang di akses oleh masyarakat.

3. Jaminan Kesehatan

Nilai indeks jaminan kesehatan adalah sebesar 0,5. Hal ini menunjukkan bahwa keikutsertaan masyarakat terhadap jaminan kesehatan tergolong cukup baik. Sekitar 40 persen sampai 50 persen warga desa memiliki kartu jaminan kesehatan. Jaminan kesehatan yang masyarakat miliki berupa BPJS dan Kartu Indonesia Sehat (KIS).

E. Nilai Indeks Dimensi Pendidikan Pada Masyarakat Desa Tambarana

Dimensi ini memberikan porsi 0,20 dalam perhitungan IDZ. Dimensi pendidikan terdiri dari dua variabel yang diukur, yaitu tingkat pendidikan dan literasi serta fasilitas pendidikan. Nilai indeks dimensi pendidikan diperoleh dari hasil perhitungan variabel dan indikator penyusunnya. Rumus yang digunakan adalah tahap ketiga sebagai berikut:

$$IDZ = 0,50(X1) + 0,50(X2)$$

$$IDZ = 0,50(1) + 0,50(0,595)$$

$$IDZ = 0,50 + 0,2975$$

$$IDZ = 0,79$$

Tabel 4.3

Nilai Indeks Variabel Dimensi Pendidikan

Variabel	Bobot Variabel	Indeks Variabel	Keterangan	Interpretasi
Tingkat Pendidikan dan Literasi	0,50	1	Sangat Baik	Tidak Diprioritaskan Untuk Dibantu
Fasilitas Pendidikan	0,50	0,595	Cukup Baik	Dapat dipertimbangkan Untuk Dibantu

Sumber: Data Diolah 2019

Berdasarkan tabel 4.7 di atas hasil pengukuran masing-masing variabel memiliki nilai indeks 1 dan 0,595. Secara umum kondisi pendidikan masyarakat dapat dikatakan sudah baik didukung dengan fasilitas pendidikan yang ada di desa ini. Meskipun demikian pada kenyataan masih ada beberapa indikator dalam variabel ini yang meunjukkan tingkat ketersediaan jumlah guru yang rendah.

1. Tingkat Pendidikan dan Literasi

Tingkat pendidikan dan literasi menjadi parameter dalam pengukuran Indeks Desa Zakat, dengan melihat dua hal yaitu gambaran umum kondisi pendidikan masyarakat desa dan tingkat baca hitung masyarakat desa. Tingkat pendidikan penduduk desa bernilai sebesar 1,00 yang artinya pendidikan masyarakat Desa Tambarana sudah baik, namun kesadaran penduduk untuk melanjutkan pendidikan penduduk desa masih rendah.

Berdasarkan data yang diperoleh dari kantor desa, lulusan terbanyak adalah jenjang Sekolah Dasar (SD) yaitu sebanyak 539 orang. Lulusan Taman Kanak-Kanak (TK) sebanyak 98 orang, lulusan Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebanyak 276 orang, lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA) yaitu sebanyak 200 orang, lulusan akademi D1-D3 sebanyak 27 orang, lulusan Sarjana yaitu sebanyak 50 orang, dan lulusan program Pascasarjana sebanyak 124 orang. Kaitannya dengan tingkat baca hitung penduduk desa, rata-rata penduduk desa usia 15-45 tahun sudah dapat membaca dan berhitung dengan nilai indeks indikator yaitu sebesar 1,00.

2. Fasilitas Pendidikan

Variabel fasilitas pendidikan memperoleh nilai indeks sebesar 0,595. Nilai tersebut menunjukkan bahwa kondisi fasilitas pendidikan di Desa Tambarana tergolong dalam kondisi yang cukup baik. Terdapat tiga indikator penyusun variabel fasilitas pendidikan, yaitu ketersediaan sarana dan prasarana belajar yang memiliki nilai indeks 1,00 yang berarti dalam kondisi baik. Sarana dan prasarana belajar yang tersedia di Desa Tambarana adalah terdapat 3 buah PAUD, 1 buah Taman Kanak-Kanak (TK), terdapat 3 buah SD, dan terdapat 1 buah SMP.

Tersedia sarana belajar seperti ruang kelas, meja, kursi dan papan tulis yang memadai dan layak pakai.

Indikator akses menuju ke sekolah terjangkau dan mudah memiliki nilai indeks 0,75. Hal ini menunjukkan bahwa akses ke sekolah pun dapat terjangkau oleh masyarakat desa. Jarak dari Desa Tambarana menuju ke sekolah SMA dan SMK terdekat yaitu kurang lebih sekitar 4-5 KM. Sarana yang digunakan untuk mencapai sekolah kebanyakan menggunakan kendaraan pribadi untuk sampai ke sekolah. Nilai indeks indikator ketersediaan jumlah guru yang memadai adalah 0. Hal ini disebabkan karena jumlah murid yang diawasi oleh satu orang guru per kelasnya kurang lebih mencapai 36-40 siswa.

F. Nilai Indeks Dimensi Sosial dan Kemanusiaan Pada Masyarakat Desa Tambarana

Nilai pembobotan dari indeks dimensi sosial dan kemanusiaan adalah sebesar 0,17. Itu artinya dimensi sosial dan kemanusiaan memberikan proporsi 0,17 dari total perhitungan Indeks Desa Zakat (IDZ). Di Desa Tambarana nilai indeks dimensi sosial dan kemanusiaan adalah sebesar 0,62 hal ini menunjukkan kondisi dari sosial dan kemanusiaan Desa Tambarana dalam keadaan baik sehingga menurut indeks kurang diprioritaskan untuk dibantu.

Terdapat tiga variabel yang diukur dalam dimensi ini yaitu sarana ruang interaksi terbuka masyarakat, infrastruktur listrik, komunikasi, dan informasi serta mitigasi bencana alam. Nilai indeks dimensi sosial dan kemanusiaan dapat dihitung dengan menggunakan rumus tahaap ketiga sebagai berikut:

$$IDZ = 0,36(X1) + 0,43(X2) + 0,21(X3)$$

$$IDZ = 0,36(0,53) + 0,43(0,8875) + 0,21(0,25)$$

$$IDZ = 0,1908 + 0,3816 + 0,0525$$

$$IDZ = 0,62$$

Tabel 4.4

Nilai Indeks Variabel Dimensi Sosial dan Kemanusiaan

Variabel	Bobot Variabel	Indeks Variabel	Keterangan	Interpretasi
Sarana Ruang Interaksi Terbuka Masyarakat	0,36	0,53	Cukup Baik	Dapat Dipertimbangkan Untuk Dibantu
Infrastruktur Listrik, Komunikasi dan Informasi	0,43	0,8875	Sangat Baik	Tidak Diprioritaskan Untuk Dibantu
Mitigasi Bencana Alam	0,21	0,25	Kurang Baik	Diprioritaskan Untuk Dibantu

Sumber: Data Diolah 2019

Berdasarkan tabel 4.8 terlihat bahwa masing-masing variabel memperoleh nilai indeks 0,53; 0,8875 dan 0,25. Nilai tersebut menunjukkan bahwa secara umum sarana interaksi terbuka masyarakat serta infrastruktur listrik, komunikasi dan informasi telah tersedia di Desa Tambarana. Mitigasi bencana alam bernilai 0,25 dikarenakan menurut wawancara kepala desa masih kurang sistem peringatan dini bencana alam, adapun yang tersedia hanya sistem peringatan dini bencana alam yang terdapat di dekat sungai. Berikut penjelasan lebih rinci mengenai variabel penyusun dimensi sosial dan kemanusiaan.

1. Sarana Ruang Interaksi Terbuka Masyarakat

Variabel sarana ruang interaksi terbuka masyarakat terdiri dari dua indikator penyusun, yaitu ketersediaan sarana olahraga serta terdapat kelompok kegiatan warga. Nilai masing-masing indikator tersebut adalah 0,25 dan 0,75. Ketersediaan sarana olahraga yang ada di desa yaitu terdapat lapangan bola dan

lapangan volly yang dapat di akses oleh masyarakat. Kondisi sarana olahraga pun dalam kondisi layak untuk digunakan.

Nilai indeks indikator kelompok kegiatan warga adalah sebesar 0,75. Hal ini menunjukkan bahwa tersedianya kelompok kegiatan warga di Desa Tambarana Kecamatan Poso Pesisir Utara. Masyarakat melakukan berbagai kegiatan melalui kelompok kegiatan warga. Adapun berdasarkan hasil wawancara kepala desa dan perangkat desa lainnya, diketahui terdapat badan permusyawaratan desa, majelis taklim/pengajian, karang taruna serta arisan yang dilakukan juga oleh ibu-ibu majelis taklim.

2. Infrastruktur Listrik, Komunikasi dan Informasi

Ketersediaan infrastruktur seperti listrik serta akses terhadap komunikasi dan informasi menjadi parameter dalam perhitungan Indeks Desa Zakat karena hal tersebut sangat penting untuk mendukung kegiatan masyarakat sehari-hari. Adapun nilai indeks setiap indikatornya yaitu 1,00; 0,75; 1,00 dan 0,75. Berdasarkan indikator ketersediaan aliran listrik memperoleh nilai indeks 1,00 yang menunjukkan bahwa aliran listrik di Desa Tambarana sudah dijangkau oleh semua rumah masyarakat di desa tersebut.

Akses komunikasi memperoleh nilai indeks 0,75 yang artinya akses komunikasi di desa sudah tergolong baik. Akses internet oleh masyarakat desa yaitu sekitar 50 persen masyarakat desa telah mengakses internet dengan menggunakan jaringan seluler mereka. Sedangkan nilai indeks indikator terdapat siaran televisi atau radio yaitu 0,75 yang artinya sudah sekitar 80 persen masyarakat dapat mengakses siaran televisi atau pun radio di rumah mereka sebagai sarana hiburan dan untuk mengakses informasi.

3. Mitigasi Bencana Alam

Variabel mitigasi bencana alam memiliki indikator sistem penanggulangan bencana yang bernilai sebesar 0,25. Hal ini berarti sistem penanggulangan bencana alam yang ada di Desa Tambarana Kecamatan Poso Pesisir Utara masih tergolong dalam kondisi yang rendah. Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala desa dan perangkat desa lainnya hanya terdapat satu sistem penanggulangan bencana yang dimiliki oleh desa yaitu peringatan dini bencana alam yang pasang di sekitar sungai.

G. Nilai Indeks Dimensi Dakwah Pada Masyarakat Desa Tambarana

Bobot dimensi dakwah memberikan proporsi sebesar 0,22 dalam menentukan nilai Indeks Desa Zakat (IDZ). Nilai indeks dimensi dakwah yaitu 0,96. Nilai indeks tersebut termasuk kedalam kategori sangat baik. Dan hal tersebut menunjukkan kegiatan keagamaan di desa Tambarana dalam keadaan yang sangat baik.

Terdapat tiga variabel yang diukur dalam dimensi dakwah. Nilai indeks dimensi dakwah diperoleh dari hasil perhitungan variabel dan indikator penyusunnya. Adapun rumus yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$IDZ = 0,33(X1) + 0,30(X2) + 0,37(X3)$$

$$IDZ = 0,33(1) + 0,30(1) + 0,37(0,90)$$

$$IDZ = 0,33 + 0,30 + 0,333$$

$$IDZ = 0,96$$

Tabel 4.5
Nilai Indeks Variabel Dimensi Dakwah

Variabel	Bobot Variabel	Indeks Variabel	Keterangan	Interpretasi
Tersedianya Sarana dan Pendamping Keagamaan	0,33	1	Sangat Baik	Tidak Diprioritaskan Untuk Dibantu
Tingkat Pengetahuan Agama Masyarakat	0,30	1	Sangat Baik	Tidak Diprioritaskan untuk dibantu
Tingkat Aktivitas Keagamaan dan Partisipasi Masyarakat	0,37	0,90	Sangat Baik	Tidak Diprioritaskan Untuk Dibantu

Sumber: Data Diolah 2019

Tabel 4.9 menunjukkan bahwa variabel tersedianya sarana dan pendamping keagamaan memiliki nilai indeks 1. Hal tersebut berarti secara umum terdapat sarana dan pendamping agama yang memadai. Nilai indeks variabel tingkat pengetahuan agama masyarakat yaitu 1. Sedangkan variabel tingkat aktivitas keagamaan dan partisipasi masyarakat memiliki nilai indeks 0,90. Ini menunjukkan bahwa tingkat aktivitas keagamaan dan partisipasi masyarakat juga sangat baik. Pembahasan lebih rinci akan dibahas pada variabel-variabel yang ada di bawah ini.

1. Tersedianya Sarana dan Pendamping Keagamaan

Variabel tersedianya sarana dan pendamping keagamaan memiliki tiga indikator penyusun, yaitu ketersediaan masjid di lingkungan masyarakat, akses ke masjid serta terdapat pendamping keagamaan (ustadz/ustadzah). Sarana pendamping keagamaan menjadi hal penting dalam mendukung aktivitas masyarakat dalam beribadah.

Adapun ketersediaan masjid di lingkungan masyarakat memiliki nilai indeks sebesar 1,00. Hal ini menunjukkan bahwa ketersediaan masjid di lingkungan Desa Tambarana memadai. Sebagaimana berdasarkan hasil wawancara dengan kepala desa, diketahui terdapat 4 buah masjid dan 2 buah mushola yang tersebar di tujuh dusun yang ada di desa tersebut yang kondisi bangunannya masih kokoh dan layak untuk digunakan. Sedangkan nilai indeks akses ke masjid adalah 1,00 yang artinya akses untuk menuju ke masjid sudah sangat baik yang jaraknya berkisar antara 0-1 KM dari rumah warga.

Nilai indikator ketersediaan pendamping keagamaan adalah sebesar 1,00. Hal tersebut berarti bahwa jumlah pendamping keagamaan di desa memadai. Berdasarkan hasil wawancara imam masjid dan masyarakat setempat, diketahui terdapat sekitar lebih dari 10 orang ustadz/ustadzah yang ada di Desa Tambarana Kecamatan poso Pesisir Utara yang bertugas mengajarkan agama Islam kepada masyarakat dan guru mengaji yang mengajarkan cara membaca dan menulis Al-Qur'an kepada anak-anak di desa.

2. Tingkat Pengetahuan Agama Masyarakat

Tingkat pengetahuan agama masyarakat dapat dinilai dari dua indikator penyusun, yaitu tingkat literasi Al-Qur'an serta kesadaran masyarakat untuk membayar zakat dan infak (berbagi kepada sesama manusia). Adapun nilai indeks dari dua indikator tersebut adalah 1,00. Hal tersebut berarti dapat dikatakan bahwa secara umum kemampuan masyarakat dalam membaca Al-Qur'an sudah baik. Sekitar 85 persen jumlah penduduk muslim di Desa Tambarana dapat membaca Al-Qur'an.

Indikator kesadaran masyarakat untuk berzakat dan berinfaq memiliki nilai indeks 1,00. Yang artinya kesadaran masyarakat dalam membayar zakat dan

infak sudah tinggi atau baik. Meskipun hal tersebut baru sebatas membayar zakat fitrah di masjid. Zakat fitrah berupa beras dan bisa juga kalau ada yang mau menguangkannya. Metode pembayaran zakatnya pun masih secara personal atau masih berasal dari pengurus masjid, dan belum ada organisasi langsung oleh unit penghimpunan zakat di desa tersebut.

3. Tingkat Aktivitas Keagamaan dan Partisipasi Masyarakat

Tingkat aktivitas keagamaan dan partisipasi masyarakat dapat diukur dengan tiga indikator, yaitu terselenggaranya kegiatan rutin keagamaan, tingkat partisipasi masyarakat sholat 5 waktu berjamaah serta tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan rutin keagamaan (pengajian mingguan atau bulanan). Kegiatan rutin keagamaan memiliki nilai indeks sebesar 1,00. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat aktivitas keagamaan yang aktif dilakukan oleh masyarakat desa yang terselenggara dalam bentuk pengajian/majelis taklim.

Indikator partisipasi masyarakat dalam melakukan sholat 5 waktu secara berjamaah di masjid atau mushola memiliki nilai indeks 0,75 yang berarti bahwa partisipasi masyarakat sudah baik. Berdasarkan wawancara dengan imam masjid, diketahui bahwa jumlah jamaah sholat wajib berkisar antara 61-70 persen jamaah jika dibandingkan dengan jamaah shalat jum'at yang tersebar di beberapa masjid yang ada di desa.

Nilai indeks indikator partisipasi masyarakat dalam kegiatan rutin (pengajian mingguan atau bulanan) adalah 0,75. Nilai ini menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat terhadap kegiatan rutin keagamaan dengan frekuensi kegiatan satu kali dalam sepekan tergolong baik. Berdasarkan wawancara kepala desa dan imam masjid kegiatan ini dilakukan oleh ibu-ibu majelis taklim/pengajian yang ada di desa. tetapi meskipun demikian, angka

partisipasi masyarakat terhadap kegiatan rutin keagamaan masih tergolong rendah jika dilihat dari jumlah penduduk muslim di desa ini.

Berdasarkan hasil pengukuran Indeks Desa Zakat (IDZ) Desa Tambarana Kecamatan Poso Pesisir Utara Kabupaten Poso diperoleh nilai 0,71. Dan jika dikategorikan maka Desa Tambarana ini termasuk kedalam kategori baik yang artinya Desa Tambarana kurang diprioritaskan untuk dibantu. Berikut ini adalah perhitungan dari kelima dimensi penyusun Indeks Desa Zakat (IDZ) dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$IDZ = 0,25X1 + 0,16X2 + 0,20X3 + 0,17X4 + 0,22X5$$

$$IDZ = 0,25(0,44) + 0,16(0,79) + 0,20(0,79) + 0,17(0,62) + 0,22(0,96)$$

$$IDZ = 0,11 + 0,1264 + 0,158 + 0,1054 + 0,2112$$

$$IDZ = 0,71$$

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Bedasarkan hasil penelitian dapat diberikan suatu kesimpulan sebagai berikut:

1. Nilai indeks dimensi ekonomi pada masyarakat Desa Tambarana memiliki nilai sebesar 0,47. Artinya ditinjau dari dimensi ekonomi Desa Tambarana dikategorikan kedalam cukup baik atau dapat dipertimbangkan untuk dibantu.
2. Nilai indeks dimensi kesehatan pada masyarakat Desa Tambarana adalah sebesar 0,79. hal tersebut menunjukkan bahwa Desa Tambarana dalam keadaan baik.
3. Nilai indeks dimensi pendidikan adalah sebesar 0,79 yang berarti dalam keadaan baik sehingga kurang diprioritaskan untuk dibantu.
4. Nilai indeks dimensi sosial dan kemanusiaan pada masyarakat Desa Tambarana adalah sebesar 0,62 yang artinya desa dalam keadaan baik sehingga menurut indeks kurang diprioritaskan untuk dibantu.
5. Nilai indeks dimensi dakwah pada masyarakat Desa Tambarana yaitu 0,96. Nilai indeks tersebut termasuk kedalam kategori sangat baik yang artinya desa tidak diprioritaskan untuk dibantu dengan dana zakat.

B. Saran

Adapun saran-saran yang dapat peneliti berikan terkait selesainya skripsi ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk pemerintah desa diharapkan dapat dilakukan beberapa program kegiatan untuk lebih meningkatkan lagi kesejahteraan masyarakatnya. Terdapat satu dimensi yang secara IDZ dapat dipertimbangkan untuk dibantu yaitu dimensi ekonomi.
2. Dimensi ekonomi, bentuk bantuan yang dapat dipertimbangkan untuk diberikan adalah pemberdayaan ekonomi *mustahiq* yang dapat meningkatkan kegiatan ekonomi produktif di desa tersebut.
3. Untuk peneliti selanjutnya diharapkan dapat lebih mengembangkan lagi indikator-indikator penilaiannya agar dapat mempresentasikan kondisi suatu desa secara komprehensif dan lebih jelas lagi.
4. Untuk BAZNAS, diperlukan penyempurnaan terkait indikator penyusun komponen IDZ agar dapat lebih menggali informasi dan potensi desa secara maksimal, mengingat IDZ ini adalah alat yang dikeluarkan oleh Puskas BAZNAS. Contohnya pada indikator ketersediaan jasa logistik atau pengiriman barang, karena hamper di setiap desa tertinggal belum tersedia jasa layanan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik, *Ringkasan Eksekutif Kemiskinan Kabupaten Poso 2018*, (Poso: Badan Pusat Statistik Kabupaten Poso, 2018)
- Bahdar. “Kinerja Badan Amil Zakat Provinsi Sulawesi Tengah (Mengumpul Dan Mendistribusikan Zakat). *Jurnal Penelitian Ilmiah* Vol. 5, No. 2 (2017).
- Fordebi & Adesy. *Ekonomi dan Bisnis Islam: Seri Konsep dan Aplikasi Ekonomi dan Bisnis Islam*. Cet. 1 (Jakarta: Rajawali Pers, 2016).
- Hani'in, Umi. “Pengaruh Zakat Produktif Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Miskin di Kabupaten Sragen”. *Tesis* (Surakarta: Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 2017).
- Haris Romdhoni, Abdul. “Zakat Dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan”. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* Vol. 3, No. 1 (2017).
- Hasan, M. Ali. *Zakat dan Infak: Salah satu Solusi Mengatasi Problema Sosial di Indonesia*. Cet. 1 (Jakarta: Kencana, 2006).
- Huda, Nurul, dkk.,. *Zakat Perspektif Mikro-Makro: Pendekatan Riset*. Cet. 1 (Jakarta: Kencana, 2015).
- Jamil, Alfian. “Implementasi Indeks Desa Zakat Pada Desa Sungai Dua Kecamatan Rambutan”. *Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Islam* Vol. 1, No. 2 (2018).
- Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahnya*. (Surabaya: Halim, 2014).
- Kuncoro, Mudrajat. *Metode Riset Untuk Bisnis & Ekonomi*. Ed. 4 (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2013).
- Mariana, Hanik. “Korelasi Zakat Dengan Perilaku Konsumen dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Banyudono Ponorogo”. *Jurnal Muslim Heritage* Vol. 1, No. 1 (2016).
- Marpuah. “Potensi Filantropi Keagamaan melalui Pemberdayaan Zakat: Studi Tentang Potensi Muzakki dan Mustahik di BAZNAS”. *Jurnal PENAMAS* Vol. 29, No. 3 (2016).
- Maryam Naimah, Fairuz & Arie Rachmat Soenjoto. “Productive Zakat Distribution Effect on Micro Small and Medium Enterprises Empowerment (Case Study: BAZNAS Yogyakarta)”. *Journal of Islamic Economics and Philanthropy (JIEP)* Vol. 1, No. 3 (2018).
- Maulida, Sri, dkk.,. “The Implementation of Indeks Desa Zakat (IDZ) for Priority Areas of the Zakat Community Development (ZCD) Program for the Empowerment of Productive Mustahiq in South Kalimantan”. *International Journal of Zakat* Vol. 3, No. 3 (2018).
- Mufraini, M. Arief. *Akuntansi dan Manajemen Zakat: Mengomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan*. Cet. 1 (Jakarta: Kencana, 2006).
- Muhamad. *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam: Pendekatan Kuantitatif*. Cet. 1 (Jakarta: Rajawali Pers, 2008).

- Muin, Rahmawati. *Manajemen Zakat*. Cet. 1 (Samata: Alauddin University Press, 2011).
- Mujahidin, Akhmad. *Ekonomi Islam: Sejarah, Konsep, Instrumen, Negara, dan Pasar*. Cet. 2 (Jakarta: Rajawali Pers, 2013).
- Mujiatun, Siti. “Analisis Pelaksanaan Zakat Profesi: Upaya Pengentasan Kemiskinan di Kota Medan”. *Jurnal At-Tawassuth* Vol. 1, No. 1 (2016).
- Noor, Juliansyah. *Metodologi Penelitian*, Cet. 6 (Jakarta: Kencana, 2016).
- PUSKAS BAZNAS. *Indeks Desa Zakat: Dari Desa Untuk Zakat Yang Terukur Dan Berkemajuan*. Cet. 1 (Jakarta: PUSKAS BAZNAS, 2017).
- Qadir, Abdurrachman. *Zakat: Dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial*. Cet. 2 (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2001).
- Ridlo, Ali. “Zakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam”. *Jurnal Penelitian Al-Adl* Vol. 7, No. 1 (2014).
- Ridwan, Murtadho. “Analisis Implementasi Regulasi Zakat”. *Jurnal Yudisia* Vol. 7, No. 2 (2016).
- Rozalinda. *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah*. Cet. 1 (Jakarta: Rajawali pers, 2016).
- Sudaryono. *Metodologi Penelitian*. Cet. 1 (Jakarta: Rajawali Pres, 2017).
- Sumantri, Rinol. “Efektifitas Dana Zakat Pada *Mustahiq Zakat Community Development* Sumatera Selatan Dengan Pendekatan Cibest”. *Jurnal I-Economic* Vol. 3, No. 2 (2017).
- Sunyoto, Danang. *Metodologi Penelitian Akuntansi*. Cet. 1 (Bandung: PT Refika Aditama, 2013).
- Suryani dan Hendryadi. *Metode Riset Kuantitatif: Teori dan Aplikasi Pada Penelitian Bidang Manajemen dan Ekonomi Islam*. Cet. 1 (Jakarta: Kencana, 2015).
- Syafi’ei el-Bantanie, Muhammad. *Zakat, Infak, dan sedekah*. Cet. 2 (Bandung: Salamadani, 2011).
- Taisir, Muhammad. “Problematika Pendistribusian Zakat dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat”. *Jurnal el HIKMAH* Vol. 10, No. 2 (2016).
- Wibisono, Yusuf. *Mengelola Zakat Indonesia*. Cet. 1 (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015).
- Zainuddin. *Hukum Zakat: Perspektif Normatif, Kesejahteraan dan Keadilan Sosial*. Cet. 1 (Makassar: Alauddin University Press, 2013).

L

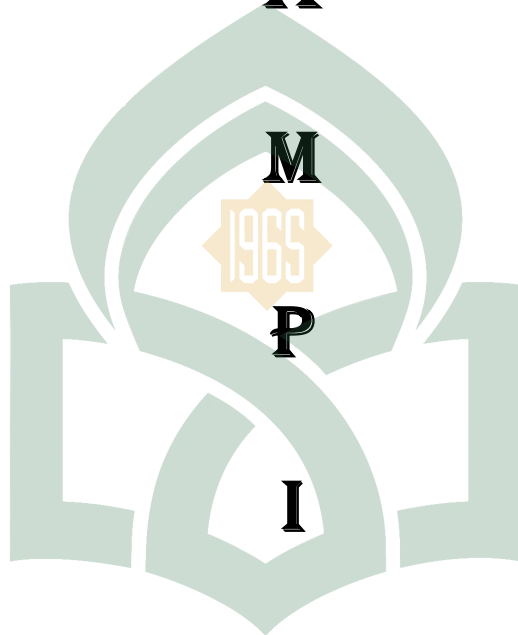
A

M



P

I



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

R

ALAUDDIN

M A K A S A R

A

N

SKALA LIKERT
HASIL PENGUKURAN PADA MASYARAKAT DESA TAMBARANA
KECAMATAN POSO PESISIR UTARA KABUPATEN POSO

EKONOMI

No.	Indikator	Kriteria					Nilai
		1	2	3	4	5	
1.	Memiliki diversifikasi produk unggulan/sentra produksi	Tidak memiliki produk unggulan	Memiliki 1-2 produk unggulan	Memiliki 3-4 produk unggulan	Memiliki 5-6 produk unggulan	Memiliki >6 produk unggulan	1
2.	Tingkat partisipasi angkatan kerja	<20% penduduk di usia produktif (15-64 tahun) memiliki mata pencaharian	20%-39% penduduk di usia produktif (15-64 tahun) memiliki mata pencaharian	40%-59% penduduk di usia produktif (15-64 tahun) memiliki mata pencaharian	60%-80% penduduk di usia produktif (15-64 tahun) memiliki mata pencaharian	>80% penduduk di usia produktif (15-64 tahun) memiliki mata pencaharian	2
3.	Terdapat komunitas penggiat industri kreatif	Tidak memiliki komunitas penggiat industri kreatif	Memiliki 1-2 komunitas penggiat industri kreatif	Memiliki 3-4 komunitas penggiat industri kreatif	Memiliki 5-6 komunitas penggiat industri kreatif	Memiliki >6 komunitas penggiat industri kreatif	1

M A K A S S A R

4.	Terdapat pasar sebagai sarana perdagangan dan penyedia kebutuhan masyarakat baik tradisional dan online (online marketing)	Desa tidak memiliki pasar dengan bangunan permanen dan semi permanen	Desa memiliki pasar dengan jadwal perdagangan tertentu	Desa memiliki pasar harian dengan bangunan semi permanen	Desa memiliki pasar harian (tradisional/modern) dengan bangunan permanen	Desa memiliki pasar modern harian dengan bangunan permanen serta memiliki pemasaran online	1
5.	Terdapat tempat berdagang (pertokoan, minimarket, warung, pusat jajanan/pujasera/pusat kuliner)	Desa tidak memiliki pertokoan, minimarket, tetapi tersedia warung kelontong dengan rasio ketersediaan terhadap penduduk <100 warung 10.000 penduduk	Desa tidak memiliki pertokoan, minimarket, tetapi tersedia warung kelontong dengan rasio ketersediaan terhadap penduduk 100 warung 10.000 penduduk	Desa tidak memiliki pertokoan tetapi tersedia minimarket dengan rasio ketersediaan terhadap penduduk <4 fasilitas per 10.000 penduduk tanpa mempertimbangkan ketersediaan warung kelontong	Desa tidak memiliki pertokoan tetapi tersedia minimarket dengan rasio ketersediaan terhadap penduduk 4 fasilitas per 10.000 penduduk tanpa mempertimbangkan ketersediaan warung kelontong	Desa terdapat kelompok pertokoan tanpa mempertimbangkan ketersediaan warung kelontong	5

6.	Akseibilitas jalan desa	Lalu lintas desa hanya dapat melalui air	Lalu lintas desa hanya dapat melalui darat, atau darat dan air, tetapi jalan darat tidak dapat dilalui kendaraan beroda empat sepanjang tahun	Lalu lintas desa hanya dapat melalui darat, atau darat dan air, jalan darat tidak dapat dilalui kendaraan beroda empat sepanjang tahun kecuali musim hujan	Lalu lintas desa hanya dapat melalui darat, atau darat dan air, jalan darat tidak dapat dilalui kendaraan beroda empat sepanjang tahun kecuali saat tertentu (hujan, pasang, dll)	Lalu lintas desa hanya dapat melalui darat, atau darat dan air, jalan darat dapat dilalui kendaraan beroda empat atau lebih sepanjang tahun	5
7.	Terdapat moda transportasi umum	Lalu lintas desa hanya dapat melalui air	Jalan desa dilintasi oleh angkutan umum tanpa trayek tetap dan tidak beroperasi setiap hari	Jalan desa dilintasi oleh angkutan umum tanpa trayek tetap dan beroperasi setiap hari	Jalan desa dilintasi oleh angkutan umum dengan trayek tetap dan tidak beroperasi setiap hari	Jalan desa dilintasi oleh angkutan umum dengan trayek tetap dan beroperasi setiap hari	5
8.	Terdapat jasa logistik/ pengiriman barang	Tidak memiliki kerjasama dengan perusahaan jasa logistik/ pengiriman barang	Memiliki kerjasama dengan perusahaan jasa logistik/ pengiriman barang yang beroperasi	Memiliki kerjasama dengan perusahaan jasa logistik/ pengiriman barang yang beroperasi sekurang-	Memiliki kerjasama dengan perusahaan jasa logistik/ pengiriman barang yang beroperasi sekurang-	Memiliki kerjasama dengan perusahaan jasa logistik/ pengiriman barang yang beroperasi setiap hari	1

			sekurang-kurangnya 1 hari dalam sebulan	kurangnya 1 hari dalam 2 minggu	kurangnya 1 hari dalam seminggu		
9.	Tersedianya dan teraksesnya lembaga keuangan Syariah dan konvensional	Desa tidak memiliki lembaga keuangan baik konvensional maupun syariah	Desa memiliki sekurang-kurangnya 1 lembaga keuangan konvensional	Desa memiliki sekurang-kurangnya 1 lembaga keuangan konvensional dan 1 lembaga keuangan syariah	Desa memiliki sekurang-kurangnya 1 lembaga keuangan konvensional dan 2 lembaga keuangan syariah	Desa memiliki sekurang-kurangnya 1 lembaga keuangan konvensional dan 3 lembaga keuangan syariah	2
10.	Keterlibatan masyarakat terhadap rentenir	Terdapat >20% masyarakat yang memiliki hutang kepada rentenir	Terdapat 16%-20% masyarakat yang memiliki hutang kepada rentenir	Terdapat 11%-15% masyarakat yang memiliki hutang kepada rentenir	Terdapat 1%-10% masyarakat yang memiliki hutang kepada rentenir	Tidak ada masyarakat yang memiliki hutang kepada rentenir	4
11.	Tingkat pengguna jasa/layanan lembaga keuangan	<20% penduduk telah menggunakan produk/layanan jasa keuangan	20%-39% penduduk telah menggunakan produk/layanan jasa keuangan	40%-59% penduduk telah menggunakan produk/layanan jasa keuangan	60%-80% penduduk telah menggunakan produk/layanan jasa keuangan	>80% penduduk telah menggunakan produk/layanan jasa keuangan	4

KESEHATAN

No.	Indikator	Kriteria					Nilai
		1	2	3	4	5	
1.	Ketersediaan fasilitas air bersih untuk mandi dan cuci di setiap rumah	<20% rumah penduduk menggunakan air bersih, masak, dan MCK	20%-39% rumah penduduk menggunakan air bersih untuk masak, dan MCK	40%-59% rumah penduduk menggunakan air bersih untuk masak, dan MCK	60%-80% rumah penduduk menggunakan air bersih untuk masak, dan MCK	>80% rumah penduduk menggunakan air bersih untuk masak, dan MCK	5
2.	Ketersediaan fasilitas kamar mandi dan jamban di dalam rumah	<20% rumah penduduk memiliki kamar mandi dan jamban di dalam rumah	20%-39% rumah penduduk memiliki kamar mandi dan jamban di dalam rumah	40%-59% rumah penduduk memiliki kamar mandi dan jamban di dalam rumah	60%-80% rumah penduduk memiliki kamar mandi dan jamban di dalam rumah	>80% rumah penduduk memiliki kamar mandi dan jamban di dalam rumah	4
3.	Sumber air minum	<20% rumah penduduk memiliki akses air minum yang terlindung meliputi air ledeng, mata air, atau sumur yang jaraknya minimal 10m	20%-39% rumah penduduk memiliki akses air minum yang terlindung meliputi air ledeng, mata air, atau sumur yang jaraknya minimal 10m	40%-59% rumah penduduk memiliki akses air minum yang terlindung meliputi air ledeng, mata air, atau sumur yang jaraknya minimal 10m dari	60%-80% rumah penduduk memiliki akses air minum yang terlindung meliputi air ledeng, mata air, atau sumur yang jaraknya minimal 10m dari	>80% rumah penduduk memiliki akses air minum yang terlindung meliputi air ledeng, mata air, atau sumur yang jaraknya minimal 10m dari	4

		dari pembuangan kotoran, limbah, dan sampah	dari pembuangan kotoran, limbah, dan sampah	pembuangan kotoran, limbah, dan sampah	pembuangan kotoran, limbah, dan sampah	pembuangan kotoran, limbah, dan sampah	
4.	Tersedia sarana puskesmas/poskesdes	Jarak menuju puskesmas/posk esdes terdekat 4km dan untuk mencapainya dirasa sulit	Jarak menuju puskesmas/posk esdes terdekat 4km dan untuk mencapainya dirasa mudah	Jarak menuju puskesmas/poskes des terdekat antara 3km-4km dan untuk mencapainya dirasa sulit	Jarak menuju puskesmas/poskes des terdekat antara 3km-4km dan untuk mencapainya dirasa mudah	Jarak menuju puskesmas/poskes des terdekat antara 1km-2km dan untuk mencapainya dirasa mudah	4
5.	Tersedia sarana polindes	Jarak menuju polindes terdekat 4km dan untuk mencapainya dirasa sulit	Jarak menuju polindes terdekat 4km dan untuk mencapainya dirasa mudah	Jarak menuju polindes terdekat antara 3km-4km dan untuk mencapainya dirasa sulit	Jarak menuju polindes terdekat antara 3km-4km dan untuk mencapainya dirasa mudah	Jarak menuju polindes terdekat antara 1km-2km dan untuk mencapainya dirasa mudah	5
6.	Tersedia sarana posyandu	<20% RW memiliki posyandu dan aktif di dalam penyelenggaraan	20%-39% RW memiliki posyandu dan aktif di dalam penyelenggaraan	40%-59% RW memiliki posyandu dan aktif di dalam penyelenggaraan	60%-80% RW memiliki posyandu dan aktif di dalam penyelenggaraan	>80% RW memiliki posyandu dan aktif di dalam penyelenggaraan	5

7.	Ketersediaan dokter di desa	Sekurang-kurangnya terdapat 1 dokter yang dapat diakses penduduk 1 kali lebih dari 1 bulan atau tidak ada dokter di desa	Sekurang-kurangnya terdapat 1 dokter yang dapat diakses penduduk 1 kali dalam 1 bulan	Sekurang-kurangnya terdapat 1 dokter yang dapat diakses penduduk 1 kali dalam 2 minggu	Sekurang-kurangnya terdapat 1 dokter yang dapat diakses penduduk 1 kali dalam 1 minggu	Sekurang-kurangnya terdapat 1 dokter yang dapat diakses penduduk setiap hari	5
8.	Tingkat kepesertaan BPJS kesehatan di masyarakat	<20% keluarga penduduk memiliki BPJS kesehatan	20%-39% keluarga penduduk memiliki BPJS kesehatan	40%-59% keluarga penduduk memiliki BPJS kesehatan	60%-80% keluarga penduduk memiliki BPJS kesehatan	>80% keluarga penduduk memiliki BPJS kesehatan	3

PENDIDIKAN

No.	Indikator	Kriteria					Nilai
		1	2	3	4	5	
1.	Tingkat pendidikan penduduk desa	<20% penduduk mengenyam pendidikan formal 12 tahun	20%-39% penduduk mengenyam pendidikan formal 12 tahun	40%-59% penduduk mengenyam pendidikan formal 12 tahun	60%-80% penduduk mengenyam pendidikan formal 12 tahun	>80% penduduk mengenyam pendidikan formal 12 tahun	5

2.	Masyarakat dapat membaca dan berhitung	<40% penduduk usia 15-45 dapat membaca dan berhitung	40%-59% penduduk usia 15-45 dapat membaca dan berhitung	60%-79% penduduk usia 15-45 dapat membaca dan berhitung	80%-100% penduduk usia 15-45 dapat membaca dan berhitung	100% penduduk usia 15-45 tahun dapat membaca dan berhitung	5
3.	Tersedia sarana dan prasarana belajar	Tidak tersedia ruang kelas untuk setiap rombongan belajar yang didalamnya dilengkapi dengan perlengkapan kelas; meja, kursi untuk setiap siswa, dan papan tulis	Tersedia ruang kelas untuk setiap rombongan belajar yang didalamnya tidak dilengkapi dengan perlengkapan kelas; kursi untuk setiap siswa, dan papan tulis	Tersedia ruang kelas untuk setiap rombongan belajar yang didalamnya hanya dilengkapi dengan salah satu perlengkapan kelas; meja, kursi untuk setiap sisw, dan papan tulis	Tersedia ruang kelas untuk setiap rombongan belajar yang didalamnya hanya dilengkapi dengan dua perlengkapan kelas; meja, kursi untuk setiap siswa, dan papan tulis	Tersedia ruang kelas untuk setiap rombongan belajar yang didalamnya hanya dilengkapi dengan semua perlengkapan kelas, meja, kursi untuk setiap siswa, dan papan tulis	5
4.	Akses ke sekolah terjangkau dan mudah	Jarak menuju ke sekolah SD, SMP, dan SMA terdekat 6km dan untuk mencapainya dirasa sulit	Jarak menuju ke sekolah SD, SMP, dan SMA terdekat 6km dan untuk mencapainya dirasa mudah	Jarak menuju ke sekolah SD, SMP, dan SMA terdekat antara 4km-6km dan untuk mencapai dirasa sulit	Jarak menuju ke sekolah SD, SMP, dan SMA terdekat antara 4km-6km dan untuk mencapai dirasa mudah	Jarak menuju ke sekolah SD, SMP, dan SMA terdekat antara 1km-3km dan untuk mencapai dirasa mudah	4

5.	Ketersediaan jumlah guru yang memadai	Setiap 1 orang guru sekurang-kurangnya dapat mendampingi 36 murid di 1 kelas	Setiap 1 orang guru sekurang-kurangnya dapat mendampingi 21-25 murid di 1 kelas	Setiap 1 orang guru sekurang-kurangnya dapat mendampingi 15-20 murid di 1 kelas			1
----	---------------------------------------	--	---	---	--	--	---

SOSIAL DAN KEMANUSIAAN

No.	Indikator	Kriteria					Nilai
		1	2	3	4	5	
1.	Ketersediaan sarana olahraga	Desa tidak tersedia fasilitas/lapangan olahraga apapun (voli, sepakbola, futsal, bulu tangkis, tenis meja, dll)	Desa tersedia 1-2 jenis fasilitas/lapangan olahraga (voli, sepakbola, futsal, bulu tangkis, tenis meja, dll)	Desa tersedia 3-4 jenis fasilitas/lapangan olahraga (voli, sepakbola, futsal, bulu tangkis, tenis meja, dll)	Desa tersedia 4-5 jenis fasilitas/lapangan olahraga (voli, sepakbola, futsal, bulu tangkis, tenis meja, dll)	Desa tersedia >5 jenis fasilitas/lapangan olahraga (voli, sepakbola, futsal, bulu tangkis, tenis meja, dll)	2

2.	Terdapat kelompok kegiatan warga (badan permusyawaratan desa, pengajian, karang taruna, arisan, dll)	Tidak terdapat kelompok kegiatan warga (badan permusyawaratan desa, pengajian, karang taruna, arisan, dll)	Terdapat 1-2 jenis kelompok kegiatan warga (badan permusyawaratan desa, pengajian, karang taruna, arisan, dll)	Terdapat 3-4 jenis kelompok kegiatan warga (badan permusyawaratan desa, pengajian, karang taruna, arisan, dll)	Terdapat 4-5 jenis kelompok kegiatan warga (badan permusyawaratan desa, pengajian, karang taruna, arisan, dll)	Terdapat >5 jenis kelompok kegiatan warga (badan permusyawaratan desa, pengajian, karang taruna, arisan, dll)	4
3.	Ketersediaan aliran listrik	Desa yang persentase keluarga pengguna listrik 20%	Desa yang persentase keluarga pengguna listrik >20%- 45%	Desa yang persentase keluarga pengguna listrik >45%- 70%	Desa yang persentase keluarga pengguna listrik >70%- 90%	Desa yang persentase keluarga pengguna listrik >90%	5
4.	Terdapat akses komunikasi (handphone)	Desa tidak mendapatkan sinyal telekomunikasi seluler	Desa mendapatkan sinyal telekomunikasi seluler tetapi sinyal tidak stabil, 0-1 bar	Desa mendapatkan sinyal telekomunikasi seluler tetapi sinyal lemah, 1-2 bar	Desa mendapatkan sinyal telekomunikasi seluler dengan sinyal kuat, 3-4 bar	Desa mendapatkan sinyal telekomunikasi seluler dengan sinyal sangat kuat, 5 bar	4
5.	Terdapat akses internet	5% penduduk desa pernah mengakses internet	>5%- 15% penduduk desa pernah mengakses internet	>15%- 25% penduduk desa pernah mengakses internet	>25%- 35% penduduk desa pernah mengakses internet	>35% penduduk desa pernah mengakses internet	5

6.	Terdapat siaran televisi atau radio	20% penduduk desa dapat mengakses siaran televisi atau radio	>20%- 40% penduduk desa dapat mengakses siaran televisi atau radio	>40%- 60% penduduk desa dapat mengakses siaran televisi atau radio	>60%- 80% penduduk desa dapat mengakses siaran televisi atau radio	>80% penduduk desa dapat mengakses siaran televisi atau radio	4
7.	Penanggulangan bencana	Desa tidak memiliki perencanaan penanganan bencana alam, sistem peringatan dini bencana, perlengkapan keselamatan, dan jalur evakuasi	Desa memiliki sekurang-kurangnya 1 kriteria dari perencanaan penanganan bencana alam, sistem peringatan dini bencana, perlengkapan keselamatan, dan jalur evakuasi	Desa memiliki sekurang-kurangnya 2 kriteria dari perencanaan penanganan bencana alam, sistem peringatan dini bencana, perlengkapan keselamatan, dan jalur evakuasi	Desa memiliki sekurang-kurangnya 3 kriteria dari perencanaan penanganan bencana alam, sistem peringatan dini bencana, perlengkapan keselamatan, dan jalur evakuasi	Desa memiliki perencanaan penanganan bencana, sistem peringatan dini bencana alam, perlengkapan keselamatan, dan jalur evakuasi	2

DAKWAH

N o.	Indikator	Kriteria					Nilai
		1	2	3	4	5	
1.	Ketersediaan masjid jami' di lingkungan masyarakat	Tidak tersedia masjid jami' yang mudah diakses dan dapat dijangkau oleh warga desa	Tersedia sekurang-kurangnya 1 masjid jami' yang mudah diakses dan dapat dijangkau oleh 20% warga desa	Tersedia sekurang-kurangnya 1 masjid jami' yang mudah diakses dan dapat dijangkau oleh 21%-50% warga desa	Tersedia sekurang-kurangnya 1 masjid jami' yang mudah diakses dan dapat dijangkau oleh 50%-80% warga desa	Tersedia sekurang-kurangnya 1 masjid jami' yang mudah diakses dan dapat dijangkau oleh 80% warga desa	5
2.	Akses ke masjid	Jarak menuju masjid terdekat >3km dan untuk mencapainya dirasa sulit	Jarak menuju masjid terdekat >3km dan untuk mencapainya dirasa mudah	Jarak menuju masjid terdekat 2,1km-3km dan untuk mencapainya dirasa sulit	Jarak menuju masjid terdekat 1,1km-2km dan untuk mencapainya dirasa mudah	Jarak menuju masjid terdekat antara 1km dan untuk mencapainya dirasa mudah	5
3.	Terdapat pendamping keagamaan (ustadz/ustadzah, dll)	Tidak ada ustadz dan ustadzah di setiap desa	Terdapat 1 ustadz/ustadzah di setiap desa	Terdapat 2 ustadz dan ustadzah di setiap desa	Terdapat 3 ustadz dan ustadzah di setiap desa	Terdapat 4 ustadz dan ustadzah di setiap desa	5

4.	Tingkat literasi Al-Qur'an masyarakat	<20% masyarakat muslim dapat membaca Al-Qur'an	20%-39% masyarakat muslim dapat membaca Al-Qur'an	40%-59% masyarakat muslim dapat membaca Al-Qur'an	60%-80% masyarakat muslim dapat membaca Al-Qur'an	>80% masyarakat muslim dapat membaca Al-Qur'an	5
5.	Partisipasi masyarakat dalam membayar zakat, infak dan sedekah	<20% masyarakat yang membayar zakat fitrah, zakat harta, dan infak/sedekah	20%-39% masyarakat yang membayar zakat fitrah, zakat harta, dan infak/sedekah	40%-59% masyarakat yang membayar zakat fitrah, zakat harta, dan infak/sedekah	60%-80% masyarakat yang membayar zakat fitrah, zakat harta, dan infak/sedekah	>80% masyarakat yang membayar zakat fitrah, zakat harta, dan infak/sedekah	5
6.	Terselenggaranya kegiatan rutin keagamaan	Terselenggaranya aktifitas keagamaan sekurang-kurangnya 1 kali dalam 3 bulan atau tidak ada kegiatan keagamaan sama sekali	Terselenggaranya aktifitas keagamaan sekurang-kurangnya 1 kali dalam 2 bulan	Terselenggaranya aktifitas keagamaan sekurang-kurangnya 1 kali dalam 1 bulan	Terselenggaranya aktifitas keagamaan sekurang-kurangnya 1 kali dalam 2 pekan	Terselenggaranya aktifitas keagamaan sekurang-kurangnya 1 kali dalam sepekan	5
7.	Tingkat aktifitas masyarakat untuk sholat 5 waktu berjamaah	Jumlah jamaah sholat wajib 20% dari jumlah jamaah	Jumlah jamaah sholat wajib 21%-41% dari jumlah jamaah	Jumlah jamaah sholat wajib 41%-60% dari jumlah jamaah sholat	Jumlah jamaah sholat wajib 61%-80% dari jumlah jamaah sholat	Jumlah jamaah sholat wajib >80% dari jumlah jamaah sholat	4

		sholat jumat.	sholat jumat.	jumat.	jumat.	jumat.	
8.	Tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan rutin keagamaan	20% masyarakat muslim hadir dan berpartisipasi pada setiap kegiatan keagamaan yang diselenggarakan	21%-40% masyarakat muslim hadir dan berpartisipasi pada setiap kegiatan keagamaan yang diselenggarakan	41%-60% masyarakat muslim hadir dan berpartisipasi pada setiap kegiatan keagamaan yang diselenggarakan	60%-80% masyarakat muslim hadir dan berpartisipasi pada setiap kegiatan keagamaan yang diselenggarakan	>80% masyarakat muslim hadir dan berpartisipasi pada setiap kegiatan keagamaan yang diselenggarakan	4

DOKUMENTASI



Wawancara dengan bapak Rustam Banano selaku Kepala Desa Tambarana



Wawancara dengan bapak Kasmin Porapi selaku Kasi Pemerintahan di Desa Tambarana



Wawancara dengan bapak Subari selaku Imam Masjid At-Taqwa di Desa Tambarana





**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UIN ALAUDDIN MAKASSAR**

Nomor : 1277 Tahun 2019

TENTANG

**PEMBIMBING/PEMBANTU PEMBIMBING DALAM PENELITIAN DAN PENYUSUNAN SKRIPSI MAHASISWA
JURUSAN EKONOMI ISLAM FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UIN ALAUDDIN MAKASSAR**

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar setelah

- Membaca** : Surat Permohonan Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar, **Maryam**, NIM:90100115037 tertanggal 24 April 2019 untuk mendapatkan Pembimbing Skripsi dengan Judul: "IMPLEMENTASI INDEKS DESA ZAKAT PADA MASYARAKAT DESA TAMBARANA KECAMATAN POSO PESISIR UTARA KABUPATEN POSO"
- Menimbang** : a. Bahwa untuk membantu penelitian dan penyusunan skripsi mahasiswa tersebut dipandang perlu untuk menetapkan pembimbing/ pembantu pembimbing penyusunan skripsi mahasiswa tersebut diatas.
- b. Bahwa mereka yang ditetapkan dalam surat keputusan dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diserahi tugas sebagai pembimbing/pembantu pembimbing menyusun skripsi mahasiswa tersebut diatas
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2010 yang disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010
4. Keputusan Presiden RI Nomor 57 Tahun 2005 tentang Perubahan Status Institute Agama Islam Negeri Alauddin Makassar menjadi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 2006 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Bahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara di Lingkungan Kementerian Agama.
6. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 25 Tahun 2013 dan Peraturan Menteri Agama Nomor 85 Tahun 2013 Tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin Makassar
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 93 Tahun 2007 tentang Statuta UIN Alauddin Makassar

MEMUTUSKAN

- Pertama** : Mengangkat / Menunjuk Saudara
1. Dr. Hj. Rahmawati Muin, S.Ag., M.Ag.
2. Dr. Marfiadi Awaluddin, SE., M.Si
- Kedua** : Tugas Pembimbing/ Pembantu Pembimbing dalam Penelitian dan Penyusunan Skripsi Mahasiswa adalah memeriksa draft skripsi dan naskah skripsi, memberi bimbingan, petunjuk-petunjuk, perbaikan mengenai materi, metode, bahasa dan kemampuan menguasai masalah.
- Ketiga** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya surat keputusan ini dibebankan pada anggaran belanja Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar.
- Keempat** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- Kelima** : Surat Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

Ditetapkan di : Samata-Gowa
Pada tanggal : 30 Juli 2019

Dekan,



PROF. DR. H. AMBO ASSE, M.Ag
NIP. 19581022 198703 1 002



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UIN ALAUDDIN MAKASSAR
NOMOR : 1871 TAHUN 2019

TENTANG

PANITIA DAN TIM PENGUJI SEMINAR PROPOSAL PENELITIAN DAN PENYUSUNAN SKRIPSI MAHASISWA
A.n.Maryam, NIM : 90100115037P
JURUSAN EKONOMI ISLAM FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UIN ALAUDDIN MAKASSAR

DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UIN ALAUDDIN MAKASSAR

- Membaca : Surat Permohonan Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar, Nama **Maryam**, NIM: **90100115037** tertanggal 23 Agustus 2019 untuk melaksanakan Seminar Proposal Skripsi dengan Judul **"Implementasi Indeks Desa Zakat pada Masyarakat Desa Tambarana Kecamatan Poso Pesisir Utara Kabupaten Poso"**.
- Menimbang : a. Bahwa untuk pelaksanaan dan kelancaran seminar proposal penelitian, perlu dibentuk panitia dan tim penguji seminar proposal penelitian dan penyusunan skripsi
b. Bahwa mereka yang ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diserahi tugas sebagai pembimbing dan penguji penyusunan skripsi mahasiswa tersebut diatas.
c. Pembimbing dan penguji penyusunan skripsi mahasiswa tersebut diatas.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2010 yang disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2010;
4. Keputusan Presiden Nomor 57 Tahun 2005 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Alauddin menjadi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar;
5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 2006 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Bahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Kementerian Agama;
6. Peraturan Menteri Agama RI No. 25 Tahun 2013 dan Peraturan Menteri Agama RI No 85 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin Makassar;
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 93 Tahun 2007 tentang Statuta UIN Alauddin Makassar.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : 1. Membentuk Panitia dan Tim Penguji Seminar Proposal penelitian dan penyusunan skripsi, Jurusan **EKONOMI ISLAM** Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar dengan komposisi :
- Kelua : Prof. Dr. H. Abutani Ilyas, M.Ag.
Sekertaris : Dr. Hj. Rahmawati Muin, S.Ag., M.Ag.
Pembimbing : Dr. Hj. Rahmawati Muin, S.Ag., M.Ag.
Pembimbing II : Dr. Murtadli Awaluddin, M.Si
Penguji I : Drs. Thamrin Logawati, M.H.
Penguji II : Akramenas, SE., M.Si.
Pelaksana : Siti Rifaqah Witranti, SE.
2. Panitia bertugas melaksanakan seminar proposal skripsi, memberi bimbingan, petunjuk-petunjuk, perbaikan mengenai materi, metode, bahasa dan dan kemampuan menguasai masalah penyusunan skripsi
3. Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya
4. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya

Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

Ditetapkan di : Samata-Gowa
Pada tanggal : 19 September 2018
Dekan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Prof. Dr. H. Abutani Ilyas, M.Ag.
NIP. 19541130 199303 1 003



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
NOMOR : 2054 TAHUN 2019

TENTANG

PANITIA DAN TIM PENGUJI KOMPREHENSIF
JURUSAN EKONOMI ISLAM FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UIN ALAUDDIN MAKASSAR

- Membaca : Surat permohonan Ujian Komprehensif **Maryam** : NIM: 90100115037
- Menimbang : Bahwa untuk pelaksanaan dan kelancaran ujian komprehensif perlu dibentuk Panitia dan Tim Penguji
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2010 yang disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2010;
4. Keputusan Presiden Nomor 57 Tahun 2005 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Alauddin menjadi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar;
5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 2004 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Bahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Kementerian Agama;
6. Peraturan Menteri Agama RI No. 25 Tahun 2013 dan Peraturan Menteri Agama R.I. No 85 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin Makassar;
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 93 Tahun 2007 tentang Statuta UIN Alauddin Makassar;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : 1. Membentuk Panitia dan Tim Penguji Komprehensif, Jurusan **EKONOMI ISLAM** Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar dengan komposisi:
- | | |
|--|--|
| Ketua | : Dr. Muh. Wahyuddin Abdullah, SE., M.Si., Ak. |
| Sekretaris | : Drs. Thamrin Logawati, M.H. |
| Penguji Dasar Islamiyah | : Hj. Wahidah Abdullah, S.Ag., M.Ag. |
| Penguji Dasar Ekonomi Syariah | : Alimuddin, SE., M.Si. |
| Penguji Keuangan dan Perbankan Syariah | : Prof. Dr. H. Muslimin Kara, M.Ag. |
| Pelaksana | : Hasanuddin |
2. Panitia bertugas melaksanakan ujian
3. Biaya pelaksanaan ujian dibebankan kepada anggaran Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar.
4. Panitia dianggap bubar setelah menyelesaikan tugasnya.
5. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

UNIVERSITAS ISLAM

ALAUDDIN
MAKASSAR

Ditandatangani di : Samata-Gowa
Pada tanggal : 02 Oktober 2019
Dekan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Prof. Dr. H. Abustani Ilyas, M.Ag.
NIP. 19661130 199303 1 003

Tersusun : 1. Dekan UIN Alauddin Makassar di Samata-Gowa
2. Para Dekan dalam Lingkungan UIN Alauddin Makassar di Makassar
3. Arif

PEMRAKARS	KASUBAG AKADEMIK
<i>ft</i>	<i>9</i>



**PEMERINTAH KABUPATEN POSO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jln. P. Timor No. 19 Poso Telp. (0452) 325502 Fax. 325502 Kode Pos 94619

SURAT IZIN PENELITIAN

NOMOR : 070 / 20 / DPM-PTSP / X / 2019

Membaca : Surat Keputusan dari Badan Penelitian Pengembangan Kesehatan
Kementrian Kesehatan Republik Indonesia No. LB 02/1/326/2019 perihal
Permohonan Izin Penelitian.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan
Daerah.
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 3 tahun
2019 Tentang Surat Pemberitahuan.
4. Keputusan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 3 Tahun 2009
Pemberitahuan Penelitian.
5. Peraturan Bupati Poso Nomor 42 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian
Wewenang Perizinan dan Non Perizinan dari Bupati Poso kepada Kepala
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Memperhatikan : Surat yang diajukan Peneliti, Maka pada prinsipnya Kepala Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Poso
Memberikan Izin Melakukan Penelitian Kepada :

N a m a : Maryam
Pekerjaan : Mahasiswa
Kebangsaan : Indonesia
Nomor Pokok : 90100115037
Program Studi : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul Penelitian : Implementasi Indeks Desa Zakat pada Masyarakat Desa Tambarana Kecamatan
Poso Pesisir Utara Kabupaten Poso.
Lokasi Penelitian : Desa Tambarana, Kecamatan Poso Pesisir Utara
Waktu Penelitian : Tanggal 11 Oktober 2019 s/d 17 Oktober 2019
Penanggung Jawab : Dr. Hj. Rahmawati Muin, M. Ag.
Dr. Murtiadi. Awaludin, SE., M.Si

Dengan Ketentuan Sebagai Berikut :

1. Sebelum Melakukan Kegiatan harus melapor kepada pihak berwenang setempat.
2. Tidak dibenarkan melakukan kegiatan yang tidak sesuai/ tidak ada kaitannya dengan judul Penelitian sebagaimana dimaksud diatas.
3. Harus menaati semua ketentuan undang-undang yang berlaku, serta mengindahkan segala tata krama kehidupan masyarakat setempat.
4. Melapor Hasil Pelaksanaan Penelitian Kepada Bupati Poso Cq. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Poso.
5. Surat Izin ini dicabut dan dinyatakan batal apabila pemegang surat izin Penelitian ini tidak menaati semua ketentuan sebagai termaksud diatas.

POSO, 09 OKTOBER 2019

K E P A L A D I N A S P E N A N A M A N M O D A L D A N
P E L A Y A N A N T E R P A D U S A T U P I N T U
K A B U P A T E N P O S O


A. MARDIUN, S. SOS, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19591127 195803 1 011

IMPLEMENTASI INDEKS DESA ZAKAT PADA MASYARAKAT
DESA TAMBARANA KECAMATAN POSO PESISIR UTARA
KABUPATEN POSO

ORIGINALITY REPORT

04/11/19 / Nurani Lolan / Hesi

23%

SIMILARITY INDEX

23%

INTERNET SOURCES

2%

PUBLICATIONS

%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	www.scribd.com Internet Source	20%
2	kabar-terhangat.blogspot.com Internet Source	1%
3	asuhyatim.blogspot.com Internet Source	1%
4	agung-saifuddin.blogspot.com Internet Source	1%
5	repository.ar-raniry.ac.id Internet Source	1%

Exclude quotes On

Exclude bibliography On

Exclude matches < 1%

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ALAUDDIN

MAKASSAR



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UIN ALAUDDIN MAKASSAR
NOMOR : 2440 TAHUN 2019

TENTANG

PANITIA DAN TIM PENGUJI SEMINAR HASIL PENELITIAN DAN PENYUSUNAN SKRIPSI MAHASISWA
A.n.Maryam, NIM : 90100115037
JURUSAN EKONOMI ISLAM FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UIN ALAUDDIN MAKASSAR

DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UIN ALAUDDIN MAKASSAR

- Membaca : Surat Permohonan Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar **Maryam, NIM: 90100115037** untuk melaksanakan seminar hasil
- Menimbang : Bahwa untuk pelaksanaan dan kelancaran seminar draft/hasil, perlu dibentuk panitia dan tim penguji seminar hasil dan penyusunan skripsi
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2010 yang disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2010;
4. Keputusan Presiden Nomor 57 Tahun 2005 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Alauddin menjadi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar;
5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 2006 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Bahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Kementerian Agama;
6. Peraturan Menteri Agama RI No. 25 Tahun 2013 dan Peraturan Menteri Agama RI No. 85 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin Makassar;
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 93 Tahun 2007 tentang Statuta UIN Alauddin Makassar

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama

Membentuk Panitia dan Tim Penguji Seminar hasil Jurusan **EKONOMI ISLAM** Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar dengan komposisi :

Ketua : Dr. Muh. Wahyuddin Abdullah, SE., M.Si., Ak.
Sekretaris : Dr. Amiruddin K. M. El.
Pembimbing : Dr. Hj. Rahmawati Muin, S. Ag., M. Ag.
Pembimbing II : Dr. Murtadi Awaluddin, M.Si.
Penguji I : Prof. Dr. H. Abustani Ilyas, M. Ag.
Penguji II : Akramunas, SE., M. Si.
Pelaksana : Nurhikma Hawabaja

1. Panitia bertugas melaksanakan seminar hasil, memberi bimbingan, petunjuk, petunjuk, perbaikan materi, metode, bahasa dan dan kemampuan menguraikan materi penyusunan skripsi
2. Biaya pelaksanaan seminar hasil penelitian dibebankan kepada anggaran Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar
3. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya

Kedua

Panitia bertugas melaksanakan seminar hasil, memberi bimbingan, petunjuk, petunjuk, perbaikan materi, metode, bahasa

Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab

Ditetapkan di : Samata-Gowa
pada tanggal : 06 November 2019

Dekan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Prof. Dr. H. Abustani Ilyas, M. Ag.
NIP. 19661130 199303 1 003

Terselamatkan : 1. Ketua UIN Alauddin Makassar di Samata-Gowa
2. Para Dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
3. Ang

PEMRAKARS	KASUBAG AKADEMIK



UIN ALAUDDIN

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
NOMOR : 2688 TAHUN 2019**

TENTANG

**PANITIA DAN TIM PENGUJI MUNAQASYAH
JURUSAN EKONOMI ISLAM FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UIN ALAUDDIN MAKASSAR

- Membaca** : Surat permohonan : **Maryam**
NIM : **90100115037**
Tanggal : **08 November 2019**
Mahasiswa Jurusan : **EKONOMI ISLAM**
Untuk Ujian Skripsi/ Munaaqasyah yang berjudul **"Implementasi Indeks Desa Zakat pada Masyarakat Desa Tambarana Kecamatan Poso Pesisir Utara Kabupaten Poso"**
- Menimbang** : 1. Bahwa saudara tersebut diatas telah memenuhi persyaratan Ujian Skripsi/ Munaaqasyah
2. Bahwa untuk pelaksanaan dan kelancaran ujian/ Munaaqasyah perlu dibentuk panitia ujian.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Keputusan Presiden Nomor 57 Tahun 2005 tentang Perubahan IAIN Alauddin menjadi UIN Alauddin Makassar;
4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 2006 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Bahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Kementerian Agama;
5. Keputusan Menteri Agama RI No. 5 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin Makassar;
6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 93 Tahun 2007 tentang Statuta UIN Alauddin Makassar;
7. Keputusan Menteri Keuangan No.330/05/2008 tentang penetapan UIN Alauddin Makassar pada Departemen Agama sebagai instansi Pemerintah yang menerapkan pengelolaan Badan Layanan Umum (BLU).
8. Surat Keputusan Rektor UIN Alauddin Nomor 241 S Tahun 2010 tentang Pedoman Edukasi UIN Alauddin.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : 1. Membentuk Panitia Ujian Skripsi/ Munaaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar dengan komposisi :

Ketua : Dr. Muh. Wahyuddin Abdullah, SE., M.Si., Ak.
Sekretaris : Dr. Amiruddin K, M.EI.
Penguji I : Prof. Dr. H. Abustani Ilyas, M.Ag.
Penguji II : Akramunas, SE., M.Si.
Pembimbing I : Dr. Hj. Rahmawati Muli, S.Ag., M.Ag.
Pembimbing II : Dr. Murtadi Awaluddin, M.Si.
Pelaksana : Nurhikma Hawabaja

2. Panitia bertugas melaksanakan ujian Skripsi/ Munaaqasyah bagi saudara yang namanya tersebut diatas.
3. Biaya pelaksanaan ujian dibebankan kepada anggaran Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar.
4. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di : **Samata-Gowa**
Pada tanggal : **12 November 2019**

Ketua Dekan
Nomor : **6111/EB.1/Kp.07/11/2019**
Tanggal : **11 November 2019**



Dr. Muh. Wahyuddin Abdullah, SE., M.Si., Ak
NIPs 19730725 200801 1 017

PEMRAKASA (FAKHRUNNISA)	KASUBAG AKADEMIK (NURMAH MUIN, S.IP.MM)

RIWAYAT HIDUP



Maryam lahir di Pendolo, Kabupaten Poso pada tanggal 15 Desember 1997. Penulis merupakan anak pertama dari tiga bersaudara, dari pasangan ayah bernama Abd. Rasyad dan ibu bernama Hasni, Penulis menyelesaikan pendidikan tingkat SD di SDN 1 Tambarana selama enam tahun lamanya dan menyelesaikan sekolah menengah pertama di SMP

Negeri 2 Poso Pesisir Utara selama tiga tahun, kemudian melanjutkan sekolah menengah atas di SMA Negeri 1 Sengkang yang sekarang berubah menjadi SMA Negeri 1 Wajo selama tiga tahun.

Penulis masuk di UIN Alauddin Makassar pada tahun 2015 melalui jalur SPAN-PTKIN dengan mengambil jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Penulis menyusun skripsi yang berjudul “Implementasi Indeks Desa Zakat Pada Masyarakat Desa Tambarana Kecamatan Poso Pesisir Utara Kabupaten Poso” untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Islam.